

FINAL REPORT

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA: KEAMANAN KAWASAN UNTUK Mendukung POROS MARITIM



**DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA: KEAMANAN
KAWASAN UNTUK Mendukung VISI POROS MARITIM DUNIA**



**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur**



**Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan pada Organisasi Internasional
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia**

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA: KEAMANAN KAWASAN UNTUK Mendukung VISI POROS MARITIM DUNIA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka mencapai visi poros maritim dunia, yang kemudian dikaitkan dengan sengketa teritorial di wilayah Laut China Selatan. Zona konflik terletak berdekatan dengan Kepulauan Natuna di bagian utara. Pada saat yang sama, terdapat benturan kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia Timur. Keduanya menjadikan konflik ini sebagai potensi ancaman terhadap keamanan maritim dan kestabilan kawasan. Sementara itu, keamanan maritim dan kestabilan pada level nasional dan kawasan dibutuhkan dalam mencapai visi poros maritim dunia. Maka, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa dinamika konflik Laut China Selatan pada dimensi kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan, (2) menganalisa modalitas Indonesia mencakup kualitas diplomasi dan kapabilitas militer, dalam rangka (3) menyusun sebuah rekomendasi diplomasi pertahanan Indonesia sebagai negara *non-claimant*. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, data primer dan sekunder diolah menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan pada konsep diplomasi pertahanan. Hasil analisa menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa hal. Dinamika konflik utamanya peningkatan kekuatan militer kelima negara pengklaim serta tarik menarik kepentingan kedua negara besar utama di kawasan, perlu menjadi acuan dalam mempertahankan penerapan strategi *hedging*. Indonesia juga perlu mempertahankan postur diplomasi pertahanan yang aktif menyelenggarakan inisiasi-inisiasi berdasarkan pada prinsip CBM terutama pada forum-forum multilateral. Di samping itu, penerapan *track II diplomacy* juga perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai visi poros maritim dunia secara efektif dan profesional. Dalam rangka mencapai kualitas tersebut, diplomasi pertahanan tetap perlu diiringi dengan peningkatan kapabilitas militer Indonesia pada matra laut dan udara. Penyelenggaraan diplomasi pertahanan tersebut relevan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, utamanya dalam menjaga perdamaian dunia.

Kata kunci: Diplomasi pertahanan, Laut China Selatan, sengketa wilayah, poros maritim dunia, Indonesia.

**INDONESIAN DEFENSE DIPLOMACY: REGIONAL SECURITY IN
PROMOTING THE VISION OF INDONESIA AS GLOBAL MARITIME
FULCRUM**

ABSTRACT

This research discusses Indonesian defense diplomacy in order to achieve her vision becoming the global maritime fulcrum, in relation with the territorial dispute over South China Sea. The conflict does not only involve areas adjacent to Natuna Islands at North, but also the clash of interest between United States and China in East Asia. Both factors set this conflict as a potential threat to the regional maritime security dan stability. Meanwhile, the vision requires both security and stability in national and regional level. Therefore, this study aims to (1) analyze the dynamics of conflict in South China Sea at three dimension: sovereignty, security and prosperity, (2) analyze Indonesian modalities in terms of the quality of her diplomacy and the military capability, in order to (3) formulate a recommendation for Indonesian defense diplomacy as a non-claimant country. In order to attain the objectives, primary and secondary data are analyzed qualitatively based on the concept of defense diplomacy. The result shows that Indonesian defense diplomacy needs to put some factors into consideration. The dynamic of the conflict, especially the military build-up of the five claimants and the interest clash of two regional powers, needs to be reference in retaining the practice of hedging strategy. Indonesia also needs to preserve the posture of active defense diplomacy through CBM initiations, especially in multilateral forums. It is also important to improve track II diplomacy practice to pursue the global maritime fulcrum goal effectively and professionally. The defense diplomacy then requires Indonesian military improvement in sea and air dimensions. This defense diplomacy will promote Indonesian independent and active foreign policy, especially in preserving world peace.

Keywords: *Defense diplomacy, South China Sea, territorial dispute, global maritime fulcrum, Indonesia.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
ABSTRAK		ii
<i>ABSTRACT</i>		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR GAMBAR		vi
DAFTAR GRAFIK		vii
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	4
	1.3 Tujuan Penelitian	7
	1.4 Kerangka Pemikiran	8
	1.5 Metode Penelitian	13
	1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB 2	KONFLIK LAUT CINA SELATAN	17
	2.1 Konteks Geografis Wilayah Konflik	18
	2.2 Negara-negara Pengklaim dalam Konflik Laut Cina Selatan	20
	2.3 Dinamika Konflik: Eskalasi dan Deeskalasi	23
	2.4 Kesimpulan	29
BAB 3	INDONESIA NEGARA MARITIM	30
	3.1 Latar Belakang Sejarah	30
	3.2 Posisi Strategis Indonesia	31
	3.3 Visi Poros Maritim Dunia	33
	3.4 Pilar-Pilar Poros Maritim Indonesia	34
	3.4.1 Membangun Budaya Maritim	34
	3.4.2 Penjagaan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut	36
	3.4.3 Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Maritim	37
	3.4.4 Kerja Sama Maritim Melalui Diplomasi	39

	3.4.5	Pembangunan Kekuatan Pertahanan Maritim	40
	3.5	Kesimpulan	43
BAB 4		ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA	44
	4.1	Skenario Perkembangan Lingkungan Strategis pada Konflik Laut Cina Selatan	44
	4.1.1	Dinamika Pola Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok dalam Konflik Laut Cina Selatan	47
	4.1.2	Dinamika Perkembangan Persenjataan Asia Pasifik dan Tenggara	50
	4.2	Diplomasi Pertahanan Indonesia di Laut Cina Selatan	58
	4.2.1	Modalitas Diplomasi Pertahanan Indonesia	58
	4.2.2	Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Forum Multilateral terkait LTS	60
	4.2.3	Kapabilitas Militer dalam mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia di LTS	65
	4.3	Kesimpulan	67
BAB 5		PENUTUP	66
	5.1	Kesimpulan	66
	5.2	Rekomendasi	69

DAFTAR GAMBAR

1.1	Strategy and Force Planning Framework	10
1.2	Konseptualisasi Diplomasi Pertahanan	11
2.1	South China Sea Claims	18
3.1	Posisi strategis Indonesia	32

DAFTAR GRAFIK

4.1	ASEAN Military Expenditure	54
4.2	Official PLA Budget 2001–13 (RMB bn)	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, kepentingan nasional sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, yang secara spesifik dijabarkan oleh masing-masing negara ke dalam tujuan politik, ekonomi dan militer, sangat dipengaruhi oleh fenomena kemaritiman dunia. Hal ini berkaitan dengan fakta umum bahwa dua pertiga bagian dari permukaan bumi adalah lautan. Lebih dari 150 negara yang ada di dunia merupakan negara pantai dan atau negara kepulauan. Sedangkan fenomena kemaritiman dunia itu sendiri selalu berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berdampak luas kepada upaya bangsa-bangsa di dunia dalam meningkatkan kekuatan dan keamanan teritorialnya. Konsekuensinya, strategi apapun yang dilakukan untuk melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara, harus bertumpu kepada kekuatan maritim.¹

Hal tersebut selaras dengan pemikiran Alfred Thayer Mahan dalam bukunya yang berjudul *The Influence of Sea Power Upon History*, menegaskan bahwa kekuatan maritim terdiri dari armada niaga, angkatan laut, dan pangkalan laut. Selain itu, perkembangan kekuatan maritim dipengaruhi oleh 6 elemen yaitu: geografi, posisi wilayah, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk, watak bangsa dan sikap pemerintah. Menurut Mahan, untuk menjadikan bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan-kepentingannya di laut dan membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan-kepentingan yang lebih luas lagi.² Mahan mencatat, bahwa kejadian-kejadian di laut sangat mempengaruhi keadaan di darat. Namun umumnya keputusan-keputusan politik yang diambil berdasarkan kejadian-kejadian di darat, jarang mempertimbangkan aspek kemaritiman.³ Doktrin Mahan ini kemudian

¹ Chandra Motik Yusuf (ed.), (2008), *Maritime Dimensions Of A New World Order*, dalam Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta: IND HILL CO. Hal, 95.

² Alfred T, Mahan, (2011), *Mahan on Naval Warfare: Selections from the Writings of Rear Admiral Alfred T. Mahan*, New York: Courier Dover Publications. Hal, 22.

³ Alfred T, Mahan, (2014), *Discussion of the Elements of Sea Power and Geopolitics: An Introductory Reader*, New York: Cambridge. Hal, 25.

menjadi tolak ukur pengembangan kekuatan maritim negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya berupa kepulauan yang membentang di khatulistiwa dari Bujur 95 Timur sampai Bujur 141 Timur dan dari Lintang 6 Utara sampai Lintang 11 Selatan. Indonesia mempunyai lebih dari 18.108 pulau dan luas kurang lebih 9 juta km.⁴ Kepulauan Indonesia terletak di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara Samudra India dan Samudra Pasifik serta Benua Asia dan Benua Australia yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar di Barat maupun Timur, di Utara maupun Selatan. Dalam perkembangannya, Presiden Indonesia, Joko Widodo menegaskan mengenai visi maritimnya yaitu upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia pada lembar Nawa Cita yang berisi program aksi dan pidato perdananya sesaat setelah disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.⁵ Poros Maritim Dunia bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, serta melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan.⁶

Jika diamati melalui unsur-unsur yang dimiliki Indonesia, visi Poros Maritim Dunia ini mungkin sekali akan terwujud. Namun, jika merujuk pada doktrin kekuatan maritim Mahan, masih terdapat beberapa syarat yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi *maritime power*, sehingga kemudian menjadi Poros Maritim Dunia. Konsekuensi dari Poros Maritim Dunia adalah tuntutan akan kapasitas Angkatan Laut yang memadai untuk mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan maritim. Keamanan maritim sendiri memiliki pengertian kegiatan sipil maupun militer untuk mengurangi resiko dan melawan kegiatan ilegal dan ancaman dalam ruang domain maritim dengan cara penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga dan kepentingan

⁴ Cribb, R. B., & Ford, M. (Eds.), (2009), *Indonesia Beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Hal, 1.

⁵ Manurung, H, (2014), *Indonesia's Maritime Pivot and Joko Widodo (Jokowi) Transformational Leadership*, SSRN 2510986.

⁶*Ibid.*

nasional.⁷ Secara singkat, Indonesia harus mampu menyelenggarakan tata tertib di laut atau menciptakan keamanan maritim yang merupakan salah satu prasyarat untuk dapat diakui sebagai Poros Maritim Dunia.

Salah satu permasalahan paling besar terkait dengan keamanan maritim di kawasan adalah konflik Laut Cina Selatan. Dalam kurun waktu yang cukup lama negara-negara di kawasan Asia Tenggara terlibat sengketa yang rumit atas kepemilikan wilayah teritorial Laut Cina Selatan. Tiongkok, Taiwan, Viet Nam, Brunei, Filipina dan Malaysia merupakan pihak yang terlibat langsung dan merupakan negara pengklaim dalam sengketa klaim wilayah Laut Cina Selatan. Pada wilayah tersebut, terdapat lima kelompok gugusan kepulauan yang dipersengketakan, yaitu Kepulauan Spratly, Paracel, Pratas, Maccalesfield dan Scarborough. Wilayah Laut Cina Selatan sendiri merupakan wilayah strategis baik dari sisi sumber daya alam, ekosistem maritim, maupun sebagai salah satu jalur transportasi utama minyak dunia. Persengketaan yang terjadi antar aktor negara di wilayah ini telah berhasil menarik perhatian sebagai obyek perdebatan regional karena sampai saat ini belum juga tercapai kesepakatan diantara pihak-pihak terkait terhadap penyelesaian konflik. Permasalahan ini merupakan salah satu ancaman terbesar bagi stabilitas keamanan nasional Indonesia maupun keamanan kawasan yang selama ini sudah terjalin dengan baik diantara negara-negara dalam kawasan melalui kerjasama regional ASEAN.⁸

Indonesia pada awalnya tidak terlibat, namun Indonesia mulai terusik oleh konflik kawasan karena pada tahun 1990-an Tiongkok menerbitkan peta unilateral. Peta tersebut dikenal sebagai peta *U-Shaped* atau *nine-dash line*, dan memasukkan wilayah ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna kedalam wilayah kedaulatan Tiongkok yang dengan ditandai sembilan garis putus-putus.⁹ Hal ini tentu saja membangkitkan Indonesia untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya dan mulai terlibat dalam pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan agar tidak bertambah buruk. Indonesia cepat merespon terhadap dinamika dan potensi konflik yang diwarnai dengan aksi militer dan melibatkan berbagai pihak

⁷ Willy F Sumakul, (2014), Poros Maritim dan ISPS Code Di Indonesia, *QUARTERDECK*, Vol. 8(2): 9.

⁸ C.P.F Luhulima, (2011), *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 345.

⁹Gao, Z., & Jia, B. B, (2013), "The nine-dash line in the South China Sea: history, status, and implications", *American Journal of International Law*, 107(1): 98-124.

di kawasan Asia Timur.¹⁰ Karena perbedaan kepentingan dari berbagai pihak yang tidak dapat disinergikan dan dilanjutkan dengan aksi militer, hal ini akan menyebabkan pertikaian ini berlanjut dan semakin rumit untuk diselesaikan secara damai.

Diperlukan strategi penanganan terhadap Konflik Laut Cina Selatan sebagai prasyarat dalam mencapai keamanan maritim di kawasan. Strategi tersebut salah satunya dapat berupa diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan saat ini menjadi bagian yang penting dalam hubungan strategis di kawasan. Indonesia memang bukan merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri melalui kebijakan luar negerinya memerlukan penerjemahan konsep dan operasionalisasi visi dan misi yang sinergis dengan arah kebijakan nasional. Sejalan dengan prioritas pemerintah tahun 2014-2019, Indonesia telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam menciptakan kondisi kondusif di Laut Cina Selatan. Indonesia mendukung penuh ASEAN untuk menyelesaikan *Code of Conduct in the South China Sea*, menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog, konsultasi dan negosiasi, serta mengelola potensi konflik menjadi potensi kerja sama.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam mencapai visi poros maritim dunia, Indonesia perlu memperhatikan perkembangan konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Seperti telah disebutkan sebagiannya dalam latar belakang penelitian ini, perhatian yang besar perlu diberikan kepada konflik ini mengingat wilayah ini merupakan wilayah yang strategis dilihat dari berbagai dimensi. Pada dimensi kedaulatan, wilayah ini melibatkan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia serta berdekatan dengan batas maritim Indonesia. Permasalahan kedaulatan di antara negara-negara pengklaim di wilayah ini tidak hanya meningkatkan ketegangan dalam hubungan diplomatik di antara negara-negara tersebut, tetapi juga berpotensi menciptakan perang kecil terbuka. Hal ini terlihat dari intensitas aktivitas militer yang terus dilakukan oleh Tiongkok, Viet Nam, dan Filipina.

¹⁰ Ristian Atriandi Supriyanto, (2012), *Indonesia's South China Sea Dilemma: Between Neutrality and Self Interest*. Hal. 10.

Tiongkok terus melakukan upaya reklamasi pulau ataupun pembangunan pos-pos pemantauan di wilayah Laut Cina Selatan secara sepihak. Lebih lanjut, kapal patroli Tiongkok juga telah melakukan beberapa tindakan konfrontasi terhadap kapal eksplorasi Viet Nam dan Filipina. Peningkatan aktivitas militer ketiga negara tersebut tidak hanya menciptakan ketegangan yang bersifat kekal di antara ketiga negara, tetapi juga meningkatkan ketegangan dengan Malaysia dengan keberadaan kapal militer Tiongkok di wilayah James Shoal selama sejak awal 2014. Konfrontasi fisik di wilayah perairan yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan wilayah perairan Indonesia berpotensi menimbulkan dampak tidak hanya terhadap kestabilan kawasan tetapi juga terhadap perairan Indonesia.

Pada dimensi yang sama, wilayah Laut Cina Selatan juga berdekatan dengan batas maritim Indonesia yaitu dengan Pulau Natuna yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Meskipun Kepulauan Natuna belum secara eksplisit menjadi wilayah yang disengketakan dalam konflik ini, pemberlakuan *nine-dash line* oleh Tiongkok akan berpotensi melibatkan klaim atas wilayah Kepulauan Natuna. Tiongkok sendiri tidak pernah menyampaikan titik koordinat resmi maupun penjelasan yang memuaskan terhadap lokasi pasti dari garis-garis tersebut. Bagaimanapun, Indonesia perlu tetap waspada dan mengimplementasikan strategi yang cermat dalam menekan potensi pengklaiman wilayah di Kepulauan Natuna ke dalam koordinat *nine-dash line* di masa depan. Kewaspadaan ini meningkat sejak tahun 2009 ketika beberapa kapal milik Tiongkok berhasil ditangkap oleh Indonesia ketika melakukan pencurian ikan di wilayah EEZ Kepulauan Natuna. Apapun yang terjadi pada konflik di antara negara-negara pengklaim, apabila Kepulauan Natuna sebagai salah fitur geografis terluar, maka Indonesia masuk ke dalam wilayah yang disengketakan. Tidak hanya kedaulatan maritim Indonesia pada Kepulauan Natuna yang terancam, namun juga pada wilayah perairan di sekitarnya. Potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia juga dapat berasal dari pelibatan kekuatan-kekuatan besar di luar wilayah konflik mengingat hubungan diplomatik yang dimiliki masing-masing negara aktor utama konflik. Konflik persengketaan wilayah di kawasan ini telah menarik perhatian sebagai obyek perdebatan regional maupun global karena berkaitan dengan upaya menjaga kebebasan navigasi dan hukum laut. Lebih lanjut, pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik ini belum berhasil

mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik. Di kawasan Asia Timur terdapat negara yang merupakan kekuatan ekonomi besar serta memiliki lokasi strategis di bagian terluar sebelah timur kawasan seperti Jepang. Sedangkan, pada ruang lingkup yang lebih luas, terdapat Amerika Serikat di bagian timur, Australia di bagian selatan, India di bagian barat dan Rusia di bagian utara. Lebih lanjut, kelima negara tersebut tergabung dalam ARF (*ASEAN Regional Forum*) yang telah memasukkan konflik di wilayah ini ke dalam agenda dalam forum konsultasi yang membahas permasalahan politik dan keamanan kawasan sejak tahun 1995.

Maka, pada dimensi keamanan, konflik di wilayah Laut Cina Selatan tentu saja berpotensi berdampak pada sektor keamanan dalam skala yang lebih luas. Ketidakstabilan dalam penyelenggaraan tata tertib di wilayah perairan akan meningkatkan kekuatan ancaman terhadap keamanan maritim yang tidak hanya bersifat tradisional militer namun juga ancaman non-tradisional. Eskalasi konflik di antara kelima negara berpotensi melibatkan kekuatan militer dari luar wilayah. Selain itu, di antara ancaman dalam bentuk lainnya adalah penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan (*unreported*) dan tidak diatur (*unregulated*), perompakan, penyelundupan, serta pencurian sumber daya alam lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, namun, setiap tahunnya diperkirakan kehilangan 6,7 juta ton ikan dan ratusan triliun rupiah dari aktivitas pencurian ikan di wilayahnya. Sementara itu, sekitar 70% pelaku pelanggaran merupakan warga asing. Pada saat yang sama, wilayah Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang menjadi sumber keempat terbesar produksi laut dunia.¹¹ Dengan demikian, konflik di wilayah Laut Cina Selatan akan semakin berpengaruh bagi produksi perairan Indonesia. Dari penjelasan di atas, konflik di Laut Cina Selatan juga akan berdampak pada kesejahteraan Indonesia.

Namun, pada dimensi kesejahteraan, konflik tidak hanya akan menjadi ancaman bagi aspek pembangunan ekonomi tetapi juga pada aspek pembangunan lainnya. Gangguan keamanan di utara Kepulauan Natuna akan menciptakan gangguan pada konteks eksternal yang kondusif bagi proses pembangunan maritim Indonesia dalam mencapai visi poros maritim Indonesia. Keterlibatan

¹¹ Sebastian, L. C., Supriyanto, R. A., & Andi, I. M, (2015), "Beyond the Archipelagic Outlook: The Law of the Sea, Maritime Security and the Great Powers", *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and the Regional Order*. Hal, 308.

kekuatan-kekuatan besar di luar kawasan termasuk Amerika Serikat sebagai hegemon berpotensi mempengaruhi tatanan politik dunia. Sementara itu, dalam mewujudkan visi poros maritim berlandaskan pada Nawa Cita, Indonesia tidak hanya wajib menjaga keamanan domestik, tetapi juga memerlukan kestabilan keamanan pada konteks yang lebih luas, yaitu regional. Oleh karena itu, terkait dengan konflik ini, Indonesia perlu menjaga keseimbangan kekuatan pada ruang lingkup yang lebih luas pula. Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini menumpukan kepada beberapa pertanyaan penelitian, yaitu;

1. Modalitas apa yang harus dimiliki Indonesia dalam penguatan diplomasi pertahanan untuk mendukung pemeliharaan stabilitas kawasan?
2. Apa saja skenario yang mungkin terjadi terkait konflik Laut Cina Selatan dan bagaimana pengaruhnya bagi perwujudan visi poros maritim Indonesia?
3. Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dapat mengatasi berbagai skenario terkait konflik Laut Cina Selatan sebagai upaya untuk mendukung visi poros maritim Indonesia?
4. Bagaimana Indonesia dapat mendorong diplomasi pertahanan pada tingkat regional di ASEAN maupun arsitektur regional lainnya terkait konflik Laut Cina Selatan?
5. Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan berbagai rezim keamanan untuk meningkatkan profil diplomasi pertahanan, khususnya terkait pemeliharaan stabilitas kawasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian dimaksudkan sebagai upaya untuk menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang ilmiah mengenai upaya-upaya yang perlu terus dilakukan terkait peningkatan kualitas diplomasi dalam pemeliharaan stabilitas kawasan, serta menelaah dan memahami peluang dan strategi yang dapat dijalankan Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasional. Hasil penelitian akan berisi berbagai rekomendasi terkait diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung poros maritim yang mencakup upaya pemanfaatan rezim keamanan Internasional untuk meningkatkan profil diplomasi multilateral Indonesia.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, akan digunakan konsep Diplomasi Pertahanan sebagai strategi negara dalam menangani permasalahan pertahanan yang terkait dengan pemenuhan kepentingan nasional. Diplomasi pertahanan adalah konsep yang dinyatakan Inggris melalui *Strategic Defence Review* pada tahun 1998, yang ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik terkait pencegahan konflik dan mengelola krisis.¹² Terdapat beberapa definisi mengenai diplomasi pertahanan. Rajeswari Pillai Rajagopalan dalam jurnalnya yang berjudul “*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*” mendefinisikan diplomasi pertahanan “*categorized under such heads as defence exchanges to include joint training with the militaries of foreign countries.*”¹³ Sedangkan Matsuda Yasuhiro¹⁴ dalam essay yang berjudul “*An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*” menyatakan diplomasi pertahanan sebagai, “*all diplomatic activities relating to national security and military diplomatic activities.*”

Sementara itu, Mayor Laut (P) Salim dalam jurnal yang berjudul “*Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*” menyatakan diplomasi pertahanan sebagai tindakan “*untuk saling memperkuat confidence building measure (CBM) dan sekaligus memperkuat stabilitas kawasan.*”¹⁵ Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan adalah kegiatan diplomatik berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan militer yang meliputi pertukaran personil militer dan latihan bersama dalam rangka CBM dan memperkuat stabilitas kawasan.

¹² Centre Thucydide, (2003, 1 Januari), “AFRI 2002, Volume III – The “Defence Diplomacy”, Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence”. <http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr> diakses 5 September 2015.

¹³ Rajeswari Pillai Rajagopalan, (2008), *Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*. Hal. 1.

¹⁴ Matsuda Yasuhiro, (2006), *An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*. London: Routledge. Hal. 3.

¹⁵ Mayor Laut (P) Salim, (2012), *Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*, hal. 2.

Diplomasi pertahanan memiliki beberapa tujuan di dalam implementasinya. Adapun tujuan dari diplomasi pertahanan seperti pertemuan pasukan di berbagai kegiatan yang dilakukan setiap negara untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan menjaga kepercayaan, dan membantu dalam angkatan bersenjata yang bertanggung jawab secara demokratis, serta berkontribusi terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik.¹⁶ Secara operasional, kegiatan di atas meliputi langkah-langkah membangun kepercayaan dan keamanan, bantuan terhadap negara-negara (materiil maupun non-materiil), dan pengontrolan senjata (*arms control*).¹⁷

Diplomasi pertahanan digunakan negara tidak hanya dalam rangka kerjasama militer, melainkan juga merubah sistem atau doktrin pertahanan negara lain dilakukan melalui cara *soft power*. Selain itu, diplomasi pertahanan kontemporer juga turut mempromosikan kontrol sipil (*civil government*) sebagai usaha dalam mendukung demokrasi liberal dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendukung mitra (negara-negara) dalam mengembangkan kapabilitas agar dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian internasional melalui *peacekeeping* dan *peace-enforcement*. Terdapat tiga varian dalam perkembangan konsep diplomasi pertahanan. Pertama, diplomasi pertahanan merupakan instrumen negara untuk pengejaran kepentingan nasional yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kedua, diplomasi pertahanan secara tradisional memiliki pengertian sebagai alat kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara untuk mencari teman atau aliansi. Ketiga, pada perkembangannya, diplomasi pertahanan bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain serta mengurangi ketidakpastian di dalam lingkungan internasional.¹⁸

Batasan dan ruang lingkup diplomasi pertahanan sendiri perlahan sudah berkembang luas, hal ini terlihat dari ragam pandangan berbagai pihak. Terdapat pandangan yang melihat bahwa diplomasi pertahanan harus dikaitkan dengan *security sector reform*, *human security*, *protecting people*, dan *promoting peace*. Selain itu terdapat pihak yang mengkaitkan dengan konflik dan pembangunan

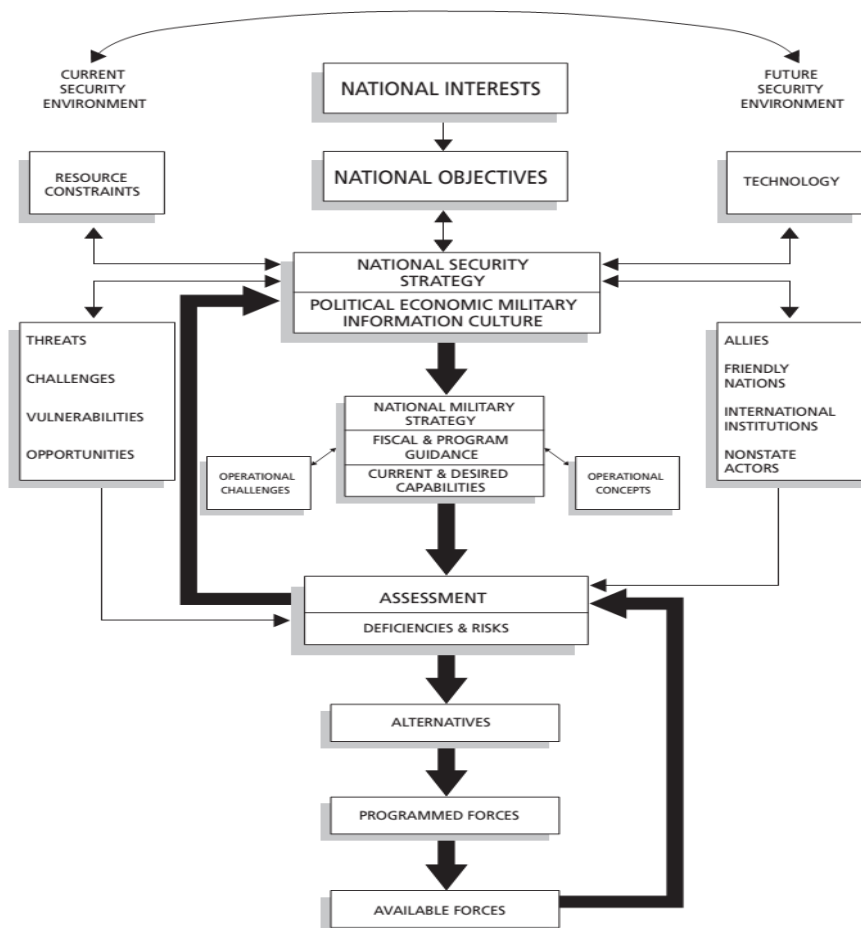
¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ United Kingdom, *Defence Diplomacy*, Ministry of Defence Policy Paper No. 1, hal 2-3.

¹⁸ Idil Syawfi, (2009), *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*, Jakarta: Universitas Indonesia dalam Arifin Multazam, (2010), *Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*, Tesis Universitas Indonesia, hal. 18.

yang mengadopsi model pertahanan Kanada yang memperkenalkan 3-D yaitu *Defence, Development and Diplomacy*. Konsep tersebut didasarkan pada perubahan lingkungan strategis, bahwa telah terjadi perubahan dari *singular military approach* ke *multi-dimensional, multi-organizational, multi-national approach* dalam rangka upaya memelihara perdamaian dunia.¹⁹ Pelaksanaan diplomasi pertahanan tidaklah berjalan sendirian, tetapi bersinergi dengan kegiatan lainnya. Dengan merujuk diagram Liotta-Lloyd posisi instrumen diplomasi berada dalam peta besar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Strategy and Force Planning Framework



Sumber: P. H. Liotta and Richmond M. Lloyd, (2005), “From Here To There: The Strategy and Force Planning Framework”, *Naval War College Review*, Vol. 58(2).

¹⁹ Robert Mangindaan, (2010), *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif NKRI*, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: Centre of Defense and Maritime Studies.

Diplomasi sebagai instrumen strategi keamanan nasional, harus bersinergi dengan instrumen lainnya membentuk satu kekuatan yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peta tersebut mengisyaratkan bahwa instrumen operasionalnya tidak boleh bekerja sendirian, pelaksanaannya harus bersinergi dengan elemen-elemen lainnya, seperti kapabilitas dan strategi militer nasional. Dalam kajian ini, operasionalisasi teori dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Konseptualisasi Diplomasi Pertahanan



Kebijakan diplomasi pertahanan telah dilaksanakan oleh Indonesia dan terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Peningkatan diplomasi pertahanan dalam satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh menguatnya kerjasama pertahanan antar negara guna merespon ancaman dan tantangan yang bersifat multidimensi, termasuk ancaman non tradisional. Namun, perkembangan demikian belum diikuti oleh kegiatan evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia terutama pada kondisi politik internasional kontemporer, dimana diplomasi pertahanan telah memainkan peran yang jauh lebih besar. Sekarang ini, masyarakat internasional mempertanyakan *maritime security arrangement* Indonesia yang dianggap ambivalen. Terdapat tiga belas instansi bekerja dilaut dan masing-masing pihak mempunyai dasar hukum yang kuat dan dalam forum diplomasi. Hal ini kemudian menciptakan pesan politis yang berbeda-beda

terhadap pihak luar. Dari sudut pandang strategi, saat ini Indonesia mengembangkan berbagai metode dan pola yang tidak bersinergi.

Diplomasi pertahanan dibagi menjadi 3 matra sesuai dengan konteks keamanan nasional, yaitu Diplomasi Pertahanan Maritim, Diplomasi Pertahanan Darat dan Diplomasi Pertahanan Udara. Pada konteks Diplomasi Pertahanan Indonesia, akan digunakan konseptualisasi Diplomasi Pertahanan Maritim yang merujuk pada 3 (tiga) dimensi pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia guna mendukung visi Poros Maritim, maka isu konflik Laut Cina Selatan yang menjadi subjek penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Dimensi kedaulatan dalam isu ini merujuk pada kemungkinan terganggunya zona maritim Indonesia. Keberadaan ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna akan terusik, apabila *nine-dash line* Tiongkok diartikan sebagai garis delimitasi maritim. Indonesia perlu terlibat dalam pengelolaan potensi konflik Laut Cina Selatan agar tidak ada dampak yang lebih buruk bagi kedaulatan maritim Indonesia maupun stabilitas kawasan. Ketidakpastian yang tinggi dalam konflik ini menyebabkan sulitnya menyusun suatu kebijakan yang berkesinambungan. Sampai saat ini memang Indonesia bukan negara yang terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan. Namun, jika *nine-dash line* Tiongkok diartikan sebagai batas kedaulatan teritorial, maka zona maritim Indonesia akan terpengaruh. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai skenario yang mungkin dihadapi Indonesia baik dalam *status quo* saat ini, maupun jika terjadi perubahan mendasar terhadap status konflik (membaik atau semakin buruk) di Laut Cina Selatan. Indonesia kemudian perlu mempersiapkan strategi yang tepat dalam menghadapi kemungkinan yang akan datang.

Dimensi keamanan dalam isu ini terkait dengan penyelenggaraan tata tertib di laut atau penguatan keamanan maritim dan stabilitas kawasan. Keamanan maritim sendiri mencakup ancaman tradisional militer maupun ancaman non-tradisional seperti panangkapan ikan ilegal, perompakan, penyelundupan atau pencurian sumber daya alam. Penguatan diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim diharapkan dapat mendukung upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dengan mengambil peluang-peluang yang ada dari tiap ancaman yang mengemuka. Arsitektur keamanan regional yang sudah ada juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama keamanan maritim, khususnya

dalam penanganan konflik Laut Cina Selatan. Dalam lingkup ASEAN dan mitra dialognya, terdapat *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM)*, *East Asia Summit (EAS)*, maupun *ASEAN Maritime Forum* yang dapat diperkuat dan dioptimalkan untuk mendorong penanganan konflik dan stabilitas kawasan. Konflik Laut Cina Selatan telah mendapat perhatian khusus dari kekuatan besar di luar kawasan, seperti Amerika Serikat. Indonesia terus mendorong sentralitas ASEAN dan peran aktif negara-negara di Asia Tenggara terhadap stabilitas kawasan agar tidak terjadi eskalasi konflik yang dapat melibatkan kekuatan militer dari luar kawasan.

Dimensi kesejahteraan merujuk pada dampak ekonomi yang ditimbulkan dari peningkatan konflik maupun ketidakstabilan kawasan. Keamanan maritim di kawasan juga berfungsi sebagai penjamin adanya lingkungan regional yang kondusif bagi proses pembangunan maritim Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari segi pemanfaatan zona maritim seperti ZEE di utara Kepulauan Natuna, maupun dari potensi kerja sama maritim yang mungkin dilakukan. Meskipun kajian ini akan lebih difokuskan untuk melihat kontribusi diplomasi pertahanan dalam mendukung stabilitas kawasan di wilayah Laut Cina Selatan, namun dampak ekonomi dari setiap skenario konflik perlu ditelaah untuk memperkaya substansi kajian.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini konsisten dengan konsep penelitian kualitatif menurut Bruce L. Berg, yang didefinisikan sebagai:

“Qualitative research is an approach to properly seeks answers to questions by examining various social settings and the individuals who inhabit these settings. Qualitative procedures provide a means of accessing unquantifiable facts about the actual people researchers observe and talk to or people represented by their personal traces (such as letters, photographs, newspaper accounts, diaries, and so on).”

Jenis penelitian ini digunakan karena akan mengkaji dan mengakses fakta-fakta aktual yang berhubungan dengan fenomena sosial yang akan diteliti dan tidak dapat diukur dengan angka seperti pada metode penelitian kuantitatif. Fenomena tersebut berupa konflik tumpang tindih klaim yang terjadi di Laut Cina Selatan. Penelitian ini mengkaji fenomena konflik Laut Cina Selatan terlebih dahulu,

kemudian mengaitkannya dengan visi Indonesia yang ingin menjadi poros maritim dunia. Kemudian, penelitian ini menganalisis dan menjelaskan mengenai bentuk diplomasi pertahanan Indonesia pada konflik Laut Cina Selatan dalam upaya mewujudkan visi poros maritim tersebut.

Setelah mengumpulkan data, penelitian ini melakukan proses “*examining*” yaitu memeriksa dan menyaring berbagai kemungkinan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemungkinan-kemungkinan tersebut berupa kepentingan-kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. Setelah itu penelitian ini menganalisa mengenai dampak konflik Laut Cina Selatan terhadap upaya Indonesia dalam mewujudkan visi poros maritim. Dalam proses ini juga dilakukan analisis mengenai nilai-nilai strategis yang terkandung di Laut Cina Selatan, antara lain potensi energi dan keamanan maritim.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif.²⁰ Dalam pembahasan metodologi, yang dimaksud dengan deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan “bagaimana?”. Hal ini dimungkinkan karena dalam rumusan masalah penelitian ini menggunakan kalimat tanya “bagaimana?” untuk mengemukakan pertanyaan penelitian. Metode penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.²¹

Penelitian dengan metode deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Selain itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian saat ini. Peneliti diharuskan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.²² Oleh karena itu, peneliti akan melaporkan hasil penelitian ini dengan apa adanya dan disertai data yang faktual

²⁰ Mochtar Mas’oed, (1990), *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, hal. 262

²¹ *Ibid*, hal. 80.

²² Alan Bryman, (2012), *Social Research Methods*, London: Oxford University Press, hal. 45

dan aktual sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola kebijakan, dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara dan seminar. Studi kepustakaan yaitu penelaahan terhadap literatur-literatur yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk mendukung akurasi data, peneliti mengadakan wawancara dan seminar yang terkait dengan tema penelitian dengan menghadirkan praktisi dan akademisi yang ahli di bidangnya. Untuk sumber-sumber primer lainnya merujuk kepada publikasi resmi pemerintah seperti Buku Putih Pertahanan tiap-tiap negara yang terlibat konflik Laut Cina Selatan, serta data-data primer dari lembaga-lembaga penelitian dan pusat informasi, baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah (*ASEAN Secretariat*, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, CSIS, dan LIPI), sedangkan untuk sumber-sumber sekunder merujuk pada hasil analisis para ahli maupun praktisi yang terkait pada tema penelitian dalam buku-buku, jurnal, *working paper*, tulisan-tulisan dari media massa dan sebagainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini dibahas melalui sistematika penulisan antar bab dengan pembagian sebanyak lima bab yang disusun sebagai berikut:

- BAB 1 : Bab pertama membahas mengenai latar belakang permasalahan yang diformulasikan ke dalam pertanyaan dengan disertai kerangka pemikiran, metode penelitian, model analisis, dan operasionalisasi konsep.
- BAB 2 : Bab dua berisi tentang hasil *literature review* tim peneliti yang berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran tim peneliti tentang beberapa sumber pustaka yang berhubungan dengan konsepsi Visi Poros Maritim sebagai bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah.

- BAB 3 : Bab tiga menjelaskan mengenai hasil temuan tim peneliti mengenai dua pertanyaan utama, yaitu yang berkenaan dengan modalitas yang harus dimiliki Indonesia, serta mengenai skenario yang mungkin terjadi terkait konflik Laut Cina Selatan dan pengaruhnya bagi perwujudan visi poros maritim Indonesia. Pada bab ini dilakukan analisis mengenai potensi Indonesia dalam tataran teoritis dan praktis serta proyeksi ancaman yang akan terjadi di Laut Cina Selatan yang berpotensi menjadi ancaman stabilitas keamanan kawasan.
- BAB 4 : Bab keempat menjelaskan mengenai hasil temuan tim peneliti mengenai pertanyaan utama pada poin ketiga, keempat, dan kelima, yaitu rekomendasi mengenai model diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya untuk mengatasi berbagai skenario terkait konflik Laut Cina Selatan dan rekomendasi mengenai diplomasi pertahanan Indonesia pada tingkat regional di ASEAN maupun arsitektur regional lainnya. Pada bab ini dianalisis mengenai sejauh mana Indonesia dapat memanfaatkan rezim-rezim serta organisasi regional dan multilateral terkait dengan pemeliharaan stabilitas kawasan.
- BAB 5 : Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisi hasil analisis tim peneliti dan kesimpulan mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Bab ini juga merupakan *executive summary* mengenai analisis. Oleh karena itu, bab ini juga berisikan rekomendasi kebijakan dari tim peneliti sesuai dengan analisa pada bab-bab sebelumnya.

BAB 2

KONFLIK LAUT CINA SELATAN

Dalam mencapai visi poros maritim dunia, Indonesia perlu mempertimbangkan faktor eksternal berupa konflik dan kerjasama internasional yang melibatkan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap perilaku negara-negara terutama yang terletak lebih dekat dengan Indonesia seharusnya mendapatkan perhatian yang besar. Hal yang sama berlaku dalam perumusan diplomasi pertahanan sebagai salah satu bentuk diplomasi dalam mencapai visi negara. Diplomasi pertahanan akan berjalan efektif apabila dalam perumusannya mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku pihak yang menjadi tujuan diplomasi itu sendiri.

Saat ini, lima negara litoral yang berada di kawasan yang sama dengan Indonesia yaitu di kawasan Asia Timur (mencakup Asia Timur Jauh dan Asia Tenggara) terlibat langsung yaitu negara pengklaim dalam konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Negara-negara tersebut adalah Tiongkok, Taiwan, Viet Nam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Namun dalam pembahasan ini peneliti akan fokus terhadap negara-negara pengklaim yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, Viet Nam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam serta negara *external power* nya, yaitu Tiongkok, sehingga penelitian ini tidak akan membahas lebih lanjut mengenai keterlibatan Taiwan. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan fokus pada keamanan kawasan Asia Tenggara yang menjadi syarat minimum yang harus dipenuhi Indonesia dalam memenuhi visi poros maritim dunia. Oleh karena itu, dalam menyusun rekomendasi terhadap diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka mencapai visi poros maritim dunia, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan konflik di wilayah tersebut serta bagaimana sikap setiap negara pengklaim dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan.

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai konstelasi persengketaan di Laut Cina Selatan berdasarkan tuntutan kelima negara pengklaim yang dapat diidentifikasi secara literal sebagai sebuah sengketa wilayah. Adapun analisa bentuk konflik lain yang relevan dengan sengketa ini akan dibahas dalam bab analisa. Pembahasan mengenai sengketa di wilayah ini akan mencakup tiga variabel dalam mengkaji konflik: (1) konteks geografis wilayah konflik, (2)

negara-negara pengklaim dalam konflik, dan (3) dinamika konflik berupa eskalasi dan deeskalasi konflik.

2.1 Konteks Geografis Wilayah Konflik

Negara-negara pengklaim dalam konflik ini saling bertetangga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang kesemuanya mengelilingi wilayah Laut Cina Selatan (lihat Gambar 2.1). Sesuai dengan namanya, wilayah maritim ini berada di bagian selatan Tiongkok dengan luas mencakup 3,5 juta kilometer persegi.²³ Laut ini juga berada di wilayah timur Viet Nam, wilayah timur dan utara Malaysia, wilayah utara Brunei Darussalam dan wilayah barat Filipina. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Malaysia bagian barat, Brunei Darussalam bagian barat hingga timur, dan Filipina bagian selatan.

Gambar 2.1 South China Sea Claim



Sumber gambar: <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/images/south-china-sea-claims3.gif>

²³ Li Guoqiang, (2015, 11 Mei), "China Sea Oil and Gas Resources," http://www.ciis.org.cn/english/2015-05/11/content_7894391.htm diakses pada 25 Agustus 2015.

Laut Cina Selatan sebagai wilayah konflik meliputi wilayah-wilayah yang disengketakan oleh kelima negara yang kesemuanya tercakup dalam *Nine-dash Line* sebagai batas klaim Tiongkok. Di antara area khusus yang termasuk dalam wilayah sengketa adalah pulau-pulau yang berada di wilayah Kepulauan Paracel/Xisha (Tiongkok)/Hoang Sa (Viet Nam) dan Kepulauan Spratly/Nansha (Tiongkok)/Kalayaan (Filipina), *Macclesfield Bank* serta *Scarborough Shoal*/Kepulauan Huangyan (Tiongkok). Kepulauan Paracel terletak di bagian selatan Tiongkok dan bagian timur Viet Nam. Kepulauan Spratly terletak di selatan Tiongkok, timur Viet Nam, utara Brunei Darussalam dan Malaysia, serta barat Filipina. *Macclesfield Bank* berada di timur Kepulauan Paracel. Sedangkan *Scarborough Shoal* terletak di bagian selatan Tiongkok dan barat Filipina. Oleh karena itu, secara topografi, wilayah konflik ini selain meliputi wilayah perairan dan pulau-pulau, juga meliputi bebatuan (*rocks*), batu karang (*coral reef*), karang (*shoal*), pulau karang (*cays*), dan fitur geografis lainnya.

Topografi yang beragam juga mempengaruhi sumber daya alam yang terkandung di wilayah ini. Dalam hal produksi ikan per tahun, wilayah ini merupakan penghasil produk laut terbesar keempat.²⁴ Laut Cina Selatan juga merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya mineral, terutamanya minyak dan gas bumi yang masih mendominasi sumber energi pembangunan banyak negara. Potensi kandungan minyak bumi di kawasan ini mencapai 213 milyar barel.²⁵ Pada tahun 2015, Tiongkok menyatakan bahwa wilayah perairan ini dapat menghasilkan lebih dari 100 milyar meter kubik gas alam.²⁶ Jumlah ini tidak jauh dari perkiraan badan lain seperti *Energy Information Administration* milik Amerika Serikat yang pada tahun 2012 memperkirakan bahwa Laut Cina Selatan dapat menghasilkan sekitar 5% dari produk gas alam dunia yaitu mencapai 190 milyar kaki kubik.²⁷

²⁴ Bing Bing Jia dan Stefan Talmon, "Introduction," dalam Bing Bing Jia dan Stefan Talmon (ed.), (2014), *The South China Sea Arbitration: A Chinese Perspective*, London/Oxford: Bloomsbury Publishing, hal. 1.

²⁵ U.S. Energy Information Administration, (2008), dikutip dalam Harnit Kaur Kang, (2012), "South China Sea: Everlasting Antagonism," *IPCS Special Report* 133, hal. 6.

²⁶ Prashanth Parameswaran, (2015, 11 Februari) "China Unveils Major South China Sea Gas Find," <http://thediplomat.com/2015/02/china-unveils-major-south-china-sea-gas-find/> diakses pada 25 Agustus 2015.

²⁷ US Energy Information Administration, (2013, 3 April), "Contested areas of South China Sea likely have few conventional oil and gas resources," <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10651> diakses pada 25 Agustus 2015.

Dalam pemetaan yang lebih luas, Laut Cina Selatan merupakan bagian yang menghubungkan berbagai bagian di dunia yang mempengaruhi tidak hanya politik, tetapi juga terutamanya perekonomian banyak negara. Wilayah ini merupakan wujud dari jalur penghubung di antara bagian barat Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Wilayah ini merupakan pusat pelosok Eurasia yang dapat dilalui atau dilayari.²⁸ Benua Eropa dan Asia terhubung oleh kapal-kapal laut dengan melalui empat selat utama. Selat Malaka yang terletak paling barat merupakan wilayah yang berada di bawah koordinasi tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar berada di bawah pengaturan Indonesia. Lebih lanjut, wilayah ini juga merupakan tempat pertemuan SLOC (*sea lines of communications*) antara *Horn of Africa* dan Laut Jepang.²⁹

2.2 Negara-negara Pengklaim dalam Konflik Laut Cina Selatan

Seperti telah dinyatakan dalam bagian sebelumnya, Laut Cina Selatan menjadi wilayah konflik yang melibatkan Tiongkok dan 4 negara anggota ASEAN (Viet Nam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam). Letak geografis dari kawasan Laut Cina Selatan termasuk kawasan yang strategis dari segi ekonomi dan politik karena memiliki potensi sumberdaya berupa minyak dan gas bumi, serta merupakan jalur laut utama perdagangan internasional. Inilah yang menjadi dasar utama atas pengklaiman kawasan tersebut. Pada sub bab ini penelitian ini akan menjelaskan mengenai sikap negara-negara pengklaim. Selanjutnya tim peneliti akan menjelaskan dasar-dasar klaim dari tiap-tiap negara pengklaim tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas yang menyebutkan kawasan Laut Cina Selatan menjadi wilayah konflik yang melibatkan Tiongkok dan 4 negara anggota ASEAN, maka tim peneliti akan menjelaskan mengenai negara-negara pengklaim berdasarkan letak geografisnya terlebih dahulu.³⁰ Tiongkok merupakan negara

²⁸ Robert D. Kaplan, 2014, *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of A Stable Pacific*, New York: Random House, hal. 9.

²⁹ *Ibid.*, hal. 14.

³⁰ Hanna Aulia, (2015), "Profil Negara-negara ASEAN", http://www.academia.edu/9374844/PROFIL_NEGARA-NEGARA_ASEAN_1_BRUNEI_DARUSSALAM diakses pada tanggal 24 Agustus 2015; EENI, (2015), "Cina (Tiongkok): geografi, penduduk, bahasa, agama, peradaban", <http://id.reingex.com/China-Population-Languages-Religion.shtml> diakses pada 24 Agustus 2015.

yang terletak di Asia Timur Jauh. Bagian utara negara ini berbatasan dengan Republik Rakyat Mongolia. Pada bagian barat, Tiongkok berbatasan dengan Pakistan, Tajikistan, Kirghistan, Kazakhtan, dan India. Di selatan Tiongkok terdapat Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Thailand, Laos, dan Viet Nam. Kemudian, di bagian timurnya, negara ini berbatasan dengan Laut Cina Timur, Laut Kuning, serta Korea Utara.

Viet Nam di bagian utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Pada bagian timur dan selatan negara ini terdapat Laut Cina Selatan. Sedangkan, pada bagian barat negara ini berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Selanjutnya adalah Filipina yang memiliki perbatasan dengan Laut Cina Selatan di bagian barat dan utara, lalu dengan Pulau Formosa (Taiwan) di bagian utara, dengan Samudera Pasifik di bagian timur, dan Indonesia di bagian selatan. Ke arah selatan dan barat, terdapat Malaysia yang karena letaknya yang cenderung paling barat di antara para negara pengklaim, memiliki perbatasan yang lebih variatif seperti halnya Tiongkok. Di perbatasan sebelah utara Malaysia terdapat Thailand, Laut Cina Selatan dan Brunei Darussalam. Kemudian, di sebelah timur Malaysia terdapat Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Di bagian selatan terdapat Indonesia dan Singapura. Kemudian, perbatasan barat Malaysia dipertemukan dengan Selat Malaka, Indonesia dan Samudera Hindia. Negara terakhir adalah Brunei Darussalam yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan di utara, dengan Malaysia di timur, selatan, dan barat.

Kemudian, setiap negara memiliki dasar klaim yang berbeda. Ada yang berdasarkan pada aspek kesejarahan, sebagian lainnya menetapkan hukum internasional sebagai dasar klaim. Dasar-dasar klaim kepemilikan wilayah yang disengketakan menurut negara-negara pengklaim kawasan Laut Cina Selatan dijelaskan per negara pada bagian selanjutnya dari sub bab ini.³¹

Tiongkok beranggapan bahwa Laut Cina Selatan merupakan wilayah kedaulatannya. Tiongkok berpedoman pada latar belakang sejarah Tiongkok kuno tentang peta wilayah kedaulatan Tiongkok (lihat penjelasan lebih rinci pada sub bab ketiga). Menurut Tiongkok, pulau-pulau dan wilayah Laut Cina ditemukan

³¹ Kolonel Karmin Suharna, (2012), "Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan dampaknya bagi ketahanan Nasional", http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments/1960_tannas%20karmin%20-%20konflik%20dan%20solusi%20laut%20china%20selatan.pdf diakses pada 24 Agustus 2015.

oleh pendahulu Tiongkok yakni Dinasti Han sejak 2 abad sebelum Masehi. Tiongkok menyatakan bahwa pada abad ke-12 sebelum Masehi ketika Tiongkok berada di bawah pemerintahan Dinasti Yuan, pulau-pulau dan wilayah laut di Laut Cina Selatan dimasukkan ke dalam peta teritori Tiongkok. Klaim ini kemudian diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13 sebelum Masehi. Pada awal abad ke-19 dan 20, Tiongkok mengemukakan bahwa Kepulauan Spratly jaraknya kurang lebih 1,100 kilometer dari pelabuhan Yu Lin yang terletak di Pulau Hainan. Kepulauan Spratly dipandang sebagai bagian dari Kepulauan Nansha dan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah Utara kepulauan Spratly, jaraknya kurang lebih 277,8 kilometer dari Pulau Hainan sebagai bagian dari Kepulauan Xisha yang menjadi bagian dari provinsi Hainan. Pada tahun 1947 Tiongkok memproduksi peta Laut Cina Selatan dengan 9 garis putus-putus (*Nine-dash Line*) dan membentuk huruf U. Tiongkok juga menyatakan semua wilayah yang ada di dalam di garis merah terputus-putus itu adalah wilayah teritori Tiongkok. Sejak tahun 1976 Tiongkok telah menduduki beberapa pulau di kepulauan Paracel dan pada tahun 1992 hukum nasional Tiongkok menegaskan kembali klaim tersebut seperti yang akan dijelaskan pada bagian ketiga dari bab ini.

Melihat faktor kesejarahan pemetaan Tiongkok yang menjadi dasar klaim Tiongkok, maka Viet Nam merespon dengan menggunakan aspek yang sama. Klaim Viet Nam akhirnya didasarkan pada latar belakang sejarah ketika Perancis tahun 1930-an masih menjajah Viet Nam. Saat itu, kepulauan Spratly dan Paracel berada di bawah kontrol Perancis. Setelah merdeka dari Perancis, Viet Nam mengklaim kedua pulau tersebut, serta memakai argumen dasar landas kontinen. Viet Nam mengklaim Kepulauan Spratly sebagai daerah lepas pantai Provinsi Khanh Hoa. Klaim Viet Nam ini mencakup area yang cukup luas di Laut Cina Selatan. Pada saat ini, Viet Nam juga telah menduduki sebagian kepulauan Spratly serta kepulauan Paracel sebagai wilayahnya.

Penggunaan landas kontinen sebagai dasar klaim juga dilakukan oleh Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Filipina mengklaim Spratly berdasarkan pada prinsip landas kontinen serta eksplorasi Spratly oleh seorang penjelajah Filipina pada tahun 1956. Menurut data penjelajah Filipina, pulau-pulau yang diklaim adalah bukan bagian dari Kepulauan Spratly dan tidak

dimiliki oleh negara manapun serta terbuka untuk diklaim. Tahun 1972, Filipina secara resmi menyatakan 8 pulau di Kepulauan Spratly sebagai bagian dari provinsi Palawaan. Luas total lahan kedelapan pulau ini adalah 790 ribu meter persegi. Terkait dengan dasar klaim yang sama, Malaysia pada akhirnya membuat batas yang diklaimnya secara jelas, namun dengan menggunakan koordinat. Malaysia telah menempati tiga pulau yang dianggap berada dalam landas kontinennya. Dalam rangka mengukuhkan wilayah klaimnya, Malaysia juga telah mencoba untuk membangun garis antar pulau dengan menggunakan pasir dan tanah. Di sisi lain, Brunei Darussalam tidak mengklaim pulau-pulau, tetapi mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan terdekat sebagai bagian landasan kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada tahun 1984, Brunei Darussalam mengumumkan ZEE yang meliputi Louisa Reef di kepulauan Spratly.

2.3 Dinamika Konflik: Eskalasi dan Deeskalasi

Secara kronologis, dinamika konflik dapat dianalisa berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi atas perilaku negara-negara pengklaim yang terlibat, serta kemunculan aktor-aktor konflik lain baik yang kemudiannya turut menjadi aktor primer, sekunder maupun yang sekadar menjadi pihak ketiga berkepentingan. Perubahan-perubahan tersebut menyumbang kepada dinamika konflik dalam bentuk perannya sebagai penyebab eskalasi atau deeskalasi konflik.

Terkait dengan perubahan-perubahan perilaku tersebut, maka bagian ini dapat dibagi kepada tiga fase. Fase yang pertama adalah ketika negara-negara yang terlibat langsung sebagai pihak yang berkonflik mengutamakan pendekatan yang bersifat bilateral, terutamanya antara Tiongkok dengan masing-masing dari negara-negara pengklaim lainnya. Fase yang kedua adalah ketika negara-negara tersebut mencoba menyelesaikan tumpang tindih klaim wilayah secara bersama-sama atau regional, termasuk menggunakan rezim, mekanisme atau organisasi kawasan. Fase yang ketiga adalah ketika perubahan kembali terjadi berupa pergeseran preferensi pengelolaan konflik dari yang bersifat multilateral ke arah bilateral kembali. Secara umum, sifat sengketa wilayah yang cukup kekal dengan eskalasi dan deeskalasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya

untuk meredam ketegangan, konfrontasi terus berlaku dalam menjaga komitmen masing-masing aktor dalam klaim mereka.

Awal mula klaim di wilayah strategis ini dapat ditelusuri dari sejak lama. Sejarah klaim dapat berawal sejak tahun 1940an dimana Tiongkok di bawah pemerintahan Kuomintang menerbitkan Peta Lokasi Pulau-pulau di Laut Cina Selatan (*Nanhai zhudou weizhi tu*) pada tahun 1947,³² atau bahkan ketika wilayah ini sebenarnya telah masuk ke dalam peta Tiongkok sejak tahun 1914.³³ Namun, Tiongkok sendiri tidak pernah mengajukan klaim secara resmi kepada pihak PBB sebelum 7 Mei 2009. Klaim resmi tersebut disampaikan sebagai respon terhadap pengajuan bersama oleh Malaysia dan Viet Nam pada bulan yang sama kepada Komisi PBB untuk Batas Landas Kontinen.³⁴ Proposal bersama tersebut meminta penambahan wilayah bersama di luar batas 200 mil. Meskipun demikian, sejarah terkait konflik terbuka dapat dilihat sejak tahun 1974 ketika Tiongkok mengambil alih Kepulauan Parasel dari Viet Nam. Insiden tersebut mengakibatkan puluhan tentara Viet Nam meninggal dunia.³⁵ Sengketa yang terlihat terlambat muncul ini kemungkinan besar karena tidak satupun dari keempat negara yang berkonflik dengan Tiongkok menyadari bahwa klaim dapat dilakukan jauh melebihi batas dari wilayah utama. Sedangkan, sejak tahun 1958, Tiongkok telah mengklaim 12 mil wilayah maritim dari kepulauan di luar daratan utama Tiongkok.³⁶

Meskipun sejarah konflik pada fase pertama dapat ditelusuri sejak pertempuran di laut antara Tiongkok dan Viet Nam pada tahun 1974, sengketa bilateral sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1950 antara Tiongkok dan Filipina. Sebagai respon atas serangan kelompok nasionalis Tiongkok di Pulau Itu Aba,

³² Li Jinming dan Li Dexia, (2003), "The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note," *Ocean Development and International Law*: 287-295 dikutip dalam Yann-huei Song dan Keyuan Sou (ed.), (2014), *Major Law and Policy Issues in the South China Sea: European and American Perspectives*, Farnham: Ashgate Publishing, hal. 250.

³³ Zou Keyuan, (1999), "The Chinese traditional maritime boundary line in the South China Sea and its legal consequences for the resolution of the dispute over the Spratly Islands," *International Journal of Marine Coastal Law*, Vol. 14, Issue 1 hal. 52, dikutip dalam International Crisis Group, (2012, 23 April), "Stirring up the South China Sea (I)," *Crisis Group Asia Report No. 223*, Beijing/Brussel: ICG, hal. 3.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Nga Pham, (2014, 15 Januari), "Shift as Viet Nam marks South China Sea battle," <http://www.bbc.com/news/world-asia-25709833> diakses pada 25 Agustus 2015. Peristiwa pada tahun 1974 secara kronologis juga dapat dibaca pada laman "Paracel (Xinsha) Islands – 1974," <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/paracel.htm>.

³⁶ S. Jayakumar, Tommy Koh, Robert Beckman, (2014), *The South China Sea Dispute and Law of the Sea*, Singapura: NUS Centre for International Law, hal. 60.

President Quirino (Filipina) ³⁷ menyatakan bahwa wilayah Kepulauan Spratly adalah milik Filipina. Meskipun demikian, Filipina baru berhasil secara resmi memasukkan Kepulauan Spratly ke dalam wilayah administratif Palawan pada tahun 1972. Tiga tahun setelah klaim resmi dan administratif oleh Filipina, Viet Nam juga mengeluarkan Buku Putih yang menyatakan kepemilikannya atas tidak hanya Kepulauan Paracel tetapi juga Kepulauan Spratly.³⁸ Namun, konflik terbuka berupa peperangan baru kembali terjadi pada tahun 1988.³⁹ Pada saat itu, perang di antara kedua negara berlangsung di wilayah perairan dekat Kepulauan Spratly. Pertempuran tersebut mengakibatkan korban jiwa sebanyak lebih dari 70 jiwa di pihak Viet Nam.⁴⁰

Peristiwa yang menentukan dalam sejarah eskalasi konflik kemudian kembali berlaku sejak tahun 1992. Tiongkok pada tahun tersebut mengeluarkan Undang-undang tentang Perairan Teritorial dan Area Yang Bersebelahan (*Law on the Territorial Waters and Their Contiguous Areas*). Di bawah undang-undang ini, Tiongkok mengklaim empat per lima wilayah Laut Cina Selatan.⁴¹ Klaim tersebut kemudian diikuti oleh pertempuran kecil dengan angkatan laut Filipina dan Viet Nam sepanjang tahun 1990. Salah satu peningkatan ketegangan pada era tersebut adalah ketika pada 30 April 1997 angkatan laut Filipina menghalangi tiga kapal Tiongkok untuk mendekati *Scarborough Shoal*.⁴² Filipina langsung memasang bendera Filipina di wilayah karang tersebut. Tiongkok telah mengklaim wilayah ini sejak tahun 1953, sehingga tindakan Filipina tersebut berpotensi mengeskalasi konflik ketika Tiongkok mengajukan protes keras. Protes keras dari Tiongkok kembali berlaku sebagai respon dari tindakan Filipina yang

³⁷ Leszek Buszynski dan Christopher B. Roberts, (2014), *The South China Sea Maritime Dispute: Political, Legal and Regional Perspectives*, New York: Routledge, hal. 9.

³⁸ East Sea Studies, (2012, 28 Mei), "A legal analysis in support of Viet Nam's position regarding the Paracel & Spratly Islands," [http://nghiencuubiendong.vn/en/publications/Viet Name-se-publications/698-a-legal-analysis-in-support-of-viet-nams-position-regarding-the-paracel-a-spratly-islands](http://nghiencuubiendong.vn/en/publications/Viet%20Name-se-publications/698-a-legal-analysis-in-support-of-viet-nams-position-regarding-the-paracel-a-spratly-islands) diakses pada 25 Agustus 2015.

³⁹ Ngo Minh Tri dan Koh Swee Lean Collin, (2014, 23 Januari), "Lessons from the Battle of the Paracel Islands," <http://thediplomat.com/2014/01/lessons-from-the-battle-of-the-paracel-islands/> diakses pada 25 Agustus 2015.

⁴⁰ Wall Street Journal, (2010, 28 Juli), "Battle of the South China Sea," <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703977004575392631691738648> diakses pada 25 Agustus 2015.

⁴¹ Mohan Malik, (2013), "Historical Fiction: China's South China Sea Claims," <http://www.worldaffairsjournal.org/article/historical-fiction-china%E2%80%99s-south-china-sea-claims> diakses pada 25 Agustus 2015.

⁴² Zou Keyuan, (1999), "Scarborough Reef: A New Flashpoint in Sino-Philippine Relations?" *IBRU Boundary and Security Bulletin* (Summer), hal. 73.

serupa. Pada tahun 1999, Filipina menempatkan BRP Sierra Madre di Second Thomas Shoal.⁴³ Hal ini dilakukan untuk menahan ekspansi Tiongkok di wilayah karang tersebut.

Deeskalasi bilateral kemudian berlaku pada akhir tahun 2000 antara Tiongkok dan Viet Nam. Kedua negara akhirnya menandatangani kesepakatan terkait aktivitas perikanan kedua negara di Teluk Tonkin setelah melalui 17 putaran negosiasi.⁴⁴ Meskipun demikian, perjanjian bilateral ini baru diratifikasi pada tahun 2004 karena negosiasi terkait hak perikanan yang sulit mencapai kesepakatan akhir. Eskalasi ketegangan konflik kembali terjadi pada 8 Januari 2005 ketika angkatan laut Cina menembak dan membunuh 9 (sembilan) dan melukai 8 (delapan) nelayan Viet Nam di Teluk Tonkin.⁴⁵

Pada fase kedua konflik, terdapat perubahan dimensi dari bilateral ke arah dimensi regional yang sebenarnya telah bermula sejak 1994. Fase ini ditandai dengan adanya upaya keempat negara ASEAN yang terlibat sengketa untuk menyelesaikan permasalahan di Laut Cina Selatan dengan Tiongkok secara multilateral. Namun, pada tahun 1994 ketika ARF pertama kali diselenggarakan, Tiongkok dengan tegas menyatakan tidak akan mendiskusikan permasalahan Laut Cina Selatan, dan isu Taiwan, dalam forum ini.⁴⁶ Tiongkok akhirnya mulai menunjukkan kesediaan membahas mengenai permasalahan di Laut Cina Selatan pada pertemuan ARF ke-2 tahun 1995.⁴⁷ Perubahan perilaku ini bertepatan dengan tekanan negara-negara ASEAN setelah Tiongkok menempati *Mischief Reef* yang berdekatan dengan Filipina pada Februari 1995. Secara resmi, pembahasan terkait Laut Cina Selatan dimasukkan ke dalam agenda pertemuan

⁴³ Gregory B. Poling, (2014, 3 April), "The Philippines' South China Sea Memorial: Sailing into the Wind," <http://csis.org/publication/philippines-south-china-sea-memorial-sailing-wind> diakses pada 25 Agustus 2015.

⁴⁴ Ian Storey, (2008), "Conflict in the South China Sea: China's Relations with Viet Nam and the Philippines," <http://www.japanfocus.org/-ian-storey/2734/article.html> diakses pada 25 Agustus 2015.

⁴⁵ Wu Si Chun, (2009), *Origin and development of Spratly Disputes*, Beijing: China Economic Public House, hal. 88-89; Raul Pedrozo, (2011), "Beijing's coastal real estate: a history of Chinese naval aggression," *Foreign Policy* (15 November); Stein Tønnesson, (2003), "Sino-Viet Nameese rapprochement and the South China Sea irritant," *Security Dialogue* Vol. 34, No. 1 (Maret), dalam catatan kaki pada International Crisis Group, (2012, 23 April), *op. cit.*, hal. 2.

⁴⁶ Kai He, (2008), *Institutional Balancing in the Asia Pacific: Economic Interdependence and China's Rise*, New York: Routledge, hal. 37.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 37-38.

antara Pejabat Senior ASEAN-Tiongkok (*ASEAN-China Senior Officials Meeting/ ASEAN-China SOM*) sejak tahun 1997.

Pada tahun 2002, ASEAN dan Tiongkok menyepakati dibentuknya *code of conduct* (CoC) terkait pemberdayaan Laut Cina Selatan. Pada ASEAN Summit ke-8 di Phnom Penh, Kamboja tanggal 4 November 2002, para Menteri Luar Negeri kesebelas negara mengadopsi sebuah Deklarasi Tata Perilaku Pihak-pihak di Laut Cina Selatan (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea/ DoC*). Di bawah deklarasi tersebut, setiap pihak, terutamanya negara-negara pengkalim konflik ini, bersepakat untuk menggunakan pendekatan yang damai dan konstruktif dalam menyelesaikan sengketa tersebut.⁴⁸ Sejak itu, ASEAN dalam berbagai forum dengan Tiongkok terus berupaya membujuk Tiongkok untuk menyepakati CoC melalui berbagai forum atau mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM). Tiongkok sendiri akhirnya secara resmi mengajukan diri untuk bergabung dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation/ TAC*) dalam ASEAN-China SOM tanggal 18-19 Agustus 2003 di Fukien, Tiongkok.⁴⁹

Namun, ketegangan di antara negara-negara pengklaim lainnya, kecuali dengan Brunei Darussalam, kembali tereskalasi dengan adanya pengajuan klaim bersama antara Malaysia dan Viet Nam pada tahun 2009. Meskipun demikian, sepanjang tahun 2010, tidak terdapat pemberitaan berarti mengenai setidaknya pertempuran kecil di antara kelima negara. Mekanisme regional yang berpusat pada ASEAN sehingga kini terus berupaya untuk menggandeng Tiongkok dan keempat negara anggota ASEAN dalam menjaga kestabilan kawasan sehingga kini.

Fase ketiga terbentuk ketika pendekatan dengan mekanisme regional mengalami perubahan kembali ke arah bilateral pada tahun 2011,⁵⁰ berupa Tiongkok-Filipina dan Tiongkok-Viet Nam. Pada 25 Februari 2011, Tiongkok

⁴⁸ ASEAN, (2002), *2002 Declaration on The Conduct of Parties In The South China Sea*, <http://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2002%20Declaration%20on%20the%20Conduct%20of%20Parties%20in%20the%20South%20China%20Sea-pdf.pdf> diunduh pada 25 Agustus 2015.

⁴⁹ Sam Bateman dan Ralf Emmers, (2008), *Security and International Politics in the South China Sea: Towards a Co-operative Management Regime*, London: Routledge, hal. 211.

⁵⁰ Tessa Jamandre, (2011, 6 Maret), "China fired at Filipino fishermen in Jackson atoll," <http://www.abs-cbnnews.com/-depth/06/02/11/china-fired-filipino-fishermen-jackson-atoll> diakses pada 25 Agustus 2015.

menembak kapal ikan milik Filipina di Atol Jackson. Penembakan ini tidak mendapatkan respon apapun dari pemerintah Filipina. Meskipun demikian, Filipina pada bulan yang sama sempat memberikan respon berupa manuver pesawat tempurnya pasca konfrontasi kapal patroli maritim Tiongkok dengan kapal eksplorasi milik Forum Energi yang dimiliki oleh pengusaha Filipina.⁵¹ Insiden serupa berlaku pada 26 Mei 2011 antara Tiongkok dan Viet Nam. Kapal patroli Tiongkok dikabarkan telah memotong kabel kapal eksplorasi milik Viet Nam di wilayah perairan dekat Teluk Cam Rahn.⁵² Konfrontasi antara ketiga pihak terus berlangsung meskipun pada 10 Oktober di tahun yang sama, Tiongkok dan Viet Nam kembali menandatangani perjanjian bilateral mengenai prinsip dasar dalam menyelesaikan permasalahan maritim.⁵³

Malaysia sendiri baru kembali berkonflik dengan Tiongkok pada Juni 2015 setelah sebelumnya selalu menyatakan bahwa Tiongkok bukanlah ancaman bagi Malaysia di Laut Cina Selatan. Ketegangan meningkat antara kedua negara ketika kapal penjaga pantai milik Tiongkok berlabuh di *Luconia Shoals* yang dianggap masuk ke dalam wilayah Borneo.⁵⁴ Malaysia pada saat itu menyatakan akan mengirimkan protes diplomatiknya kepada Tiongkok, namun pada pertengahan Agustus, Tiongkok tetap tidak memindahkan kapalnya dari Pulau Beting Patinggi Ali, Sarawak.⁵⁵ Malaysia kemudian memberikan respon dengan terus mengirimkan protes diplomatik sampai kapal Tiongkok tersebut keluar dari wilayah Malaysia.⁵⁶ Padahal, sebelum pertemuan ASEAN-Tiongkok SOM pada awal Agustus 2015, Tiongkok telah sepakat untuk bernegosiasi secara substantif terkait CoC di Laut Cina Selatan.

⁵¹ Joseph Santolan, (2011, 31 Mei), "Chinese patrol boats confront Viet Nameese oil exploration ship in South China Sea," <https://www.wsws.org/en/articles/2011/05/chin-m31.html> diakses pada 25 Agustus 2015.

⁵² Global Security, "Military Clashes in the South China Sea," <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-clash.htm> diakses pada 25 Agustus 2015.

⁵³ IBRU, (2011, 13 Oktober), "China and Viet Nam agree principles for resolving maritime disputes," https://www.dur.ac.uk/ibru/news/boundary_news/?itemno=12969 diakses pada 25 Agustus 2015.

⁵⁴ Jason Ng dan Trefor Moss, (2015, 8 Juni), "Malaysia Toughens Stance With Beijing Over South China Sea," <http://www.wsj.com/articles/malaysia-toughens-stance-with-beijing-over-south-china-sea-1433764608> diakses pada 26 Agustus 2015.

⁵⁵ Bernama, (2015, 15 Agustus), "M'sia lodges diplomatic protest against Beting Patinggi Ali intrusion," <http://www.nst.com.my/node/96317> diakses pada 26 Agustus 2016.

⁵⁶ Shayani Mukherjee, (2015, 5 Agustus), "China not playing by ASEAN rules as South China Sea tensions rise," <http://www.ibtimes.com.au/china-not-playing-asean-rules-south-china-sea-tensions-rise-1459101> diakses pada 26 Agustus 2015.

2.4 Kesimpulan

Laut Cina Selatan menjadi wilayah konflik yang melibatkan Tiongkok dan 4 negara anggota ASEAN. Kawasan Laut Cina Selatan termasuk kawasan yang strategis karena memiliki potensi sumberdaya berupa minyak dan gas bumi, serta merupakan jalur laut utama perdagangan internasional. Dalam pemetaan yang lebih luas, Laut Cina Selatan merupakan bagian yang menghubungkan berbagai bagian di dunia yang mempengaruhi tidak hanya politik, tetapi juga terutama perekonomian banyak negara. Wilayah ini merupakan wujud dari jalur penghubung di antara bagian barat Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Terdapat tiga fase penting dalam dinamika eskalasi dan deeskalasi yang terjadi pada konflik Laut Cina Selatan. Fase yang pertama berlangsung pada tahun 1974 – 1994 ketika negara-negara yang terlibat langsung sebagai pihak yang berkonflik mengutamakan pendekatan yang bersifat bilateral. Fase yang kedua berlangsung pada tahun 1995 – 2010 ketika negara-negara pengklaim mencoba menyelesaikan tumpang tindih klaim wilayah secara bersama-sama atau regional, termasuk menggunakan rezim, dan mekanisme atau organisasi kawasan. Fase yang ketiga berlangsung pada tahun 2011 - 2015 ketika perubahan kembali terjadi berupa pergeseran preferensi pengelolaan konflik dari yang bersifat multilateral ke arah bilateral kembali. Tren penyelesaian persengketaan ini berubah rubah seiring dengan meningkat dan menurunnya intensitas ketegangan konflik. Penyelesaian dengan menggunakan mekanisme regional harus didukung dengan mekanisme bilateral. Mekanisme bilateral diperlukan sebagai wadah untuk mendiskusikan alternatif penyelesaian konflik yang lebih intens dan spesifik yang sebelumnya telah dirumuskan dan direkomendasikan pada mekanisme regional.

BAB 3

INDONESIA NEGARA MARITIM

3.1. Latar Belakang Sejarah

Sejak abad VII secara ekonomi Kepulauan Indonesia telah dipersatukan oleh Kerajaan Sriwijaya dengan menguasai lalu lintas perdagangan dari barat ke timur, dari utara ke selatan di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Jawa.⁵⁷ Pada abad XIII konsep penyatuan Kepulauan Indonesia secara politik dibawah satu kekuasaan telah diletakan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari melalui semboyan *Cakrawala Mandala Dwipantara*. Semboyan ini kemudian diwujudkan Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada abad ke XIV melalui Sumpah Palapanya.⁵⁸

Selanjutnya setelah melalui proses yang panjang masa kerajaan telah berganti menjadi sebuah negara sehingga konsep tersebut dilanjutkan oleh Presiden Soekarno yang pada saat itu menyebutkan bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat jika menjadi bangsa bahari. Visi tersebut kemudian diwujudkan dengan memperkenalkan konsep negara kepulauan Indonesia melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa seluruh laut di sekeliling dan diantara pulau-pulau Indonesia adalah wilayah kedaulatan Indonesia.

Sepuluh tahun kemudian, yaitu tahun 1967, deklarasi itu disebut Wawasan Nusantara, yaitu konsep geopolitik bangsa Indonesia yang sekaligus melandasi wawasan kebangsaanya. Wawasan nusantara menegaskan suku-suku bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara dari suku bangsa Aceh di barat sampai suku bangsa Papua di timur, dari suku bangsa Sangir di utara dan suku bangsa Rote di selatan adalah satu bangsa Indonesia.⁵⁹ Semenjak deklarasi tersebut diumumkan pada tanggal 13 Desember 1957,⁶⁰ Jati diri bangsa sebagai negara kepulauan berhasil dimasukkan dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982⁶¹ *United Nations*

⁵⁷ Wahyono S.K. , (2009), *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Penerbit Teraju, hal. 2-3

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*, hal. 4

⁶¹ *Ibid*, hal.15

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) melalui perjuangan diplomasi Indonesia.

Negara kepulauan menurut UNCLOS adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. UNCLOS menentukan pula bahwa kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugus pulau-pulau tersebut dan wujud alamiah lain yang hubungannya sangat erat satu sama lain sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis ialah dianggap satu kesatuan alur.⁶² Dengan diakuinya asas Negara Kepulauan, maka perairan yang dulu merupakan bagian dari laut lepas kini menjadi “Perairan Kepulauan”, yang berarti menjadi wilayah perairan Republik Indonesia. Dalam perairan kepulauan berlaku hak lintas damai (*right of innocent passage*) bagi kapal-kapal negara lain. Namun demikian negara kepulauan dapat menanggukkan untuk sementara waktu hak lintas damai tersebut pada bagian-bagian tertentu dari perairan kepulauannya apabila dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya.⁶³

3.2. Posisi Strategis Indonesia

UNCLOS telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan (*Archipelagic state*) apabila dilihat dari wujud fisiknya. Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki kondisi konstelasi geografis yang sangat strategis, karena wilayahnya terletak pada posisi silang dunia yaitu di antara dua benua dan dua samudera. Posisi geografis tersebut menyebabkan laut di antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Disamping itu Indonesia memiliki 18.108 pulau, dengan luas perairan lautnya mencapai 5,9 juta km² dan garis pantai sepanjang 81.000 km.⁶⁴ Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai *center of gravity* kawasan Asia Pasifik. Banyak cendekiawan

⁶² N.H.T. Siahaan. *Hukum Laut Nasional. Himpunan Perundang-undangan Kemaritiman*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 322

⁶³ *Ibid.*, hal. 323

⁶⁴ Cribb, R. B., & Ford, M. (Eds.), (2009), *Indonesia Beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Hal, 1.

internasional menyebutkan, bahwa kawasan perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan perairan tropis yang berdaya dukung alam tinggi dengan kemampuan *Mega Biodiversity*, sehingga tidak dapat dipungkiri hal itu menarik keinginan (interest) negara-negara asing untuk masuk ke perairan Indonesia.⁶⁵

Gambar 3.1 Posisi strategis Indonesia



Sumber: <http://www.cia.gov> diakses pada 20 Agustus 2007

Letak geografis Indonesia yang sangat strategis tersebut selain membawa keuntungan juga menimbulkan sejumlah konsekuensi yang harus dipandang sebagai tantangan nyata dalam pengelolaan kedaulatan. Ketentuan dalam UNCLOS salah satunya menyebutkan bahwa negara kepulauan seperti Indonesia harus memberi kebebasan bagi kapal asing dan pesawat udara asing melintasi hak lintas alur laut kepulauan untuk transit dari satu bagian laut lepas atau ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*) ke bagian lain dari laut lepas atau ZEE. Meski konvensi menjamin juga mengenai hak negara kepulauan untuk menolak kapal atau

⁶⁵Draft kebijakan Kelautan Indonesia, Dewan Maritim Indonesia 2005, hal ii.

pesawat terbang melintasi wilayahnya bila dianggap mengurangi kedaulatan negaranya, namun pada kenyataannya Indonesia sulit mengontrolnya.⁶⁶

Salah satu tantangan nyata Indonesia berhubungan dengan keberadaan empat selat yang dikenal sebagai *choke point* yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Wetar dan Selat Lombok (Gambar 3.1). Kebebasan penggunaan *Sea Lane of Communication* (SLOC) dan *Sea Lane of Transportation* (SLOT) membawa kesempatan terbuka bagi lalu lalangya segala macam aktifitas penerbangan, pelayaran yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu distribusi barang serta jasa lain.⁶⁷ Hal ini membawa dampak terkait dengan meningkatnya potensi ancaman di wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia berkepentingan untuk menjaga dan memelihara keamanan sepanjang SLOC dan SLOT di wilayah yurisdiksi nasionalnya. Pemerintah Indonesia juga harus menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran seluruh pengguna laut, khususnya yang melintas di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam UNCLOS.⁶⁸

3.3. Visi Poros Maritim Dunia

Konsep maritim mulai kembali menjadi salah satu pokok pembahasan yang cukup penting ketika Joko Widodo terpilih sebagai presiden untuk periode 2014-2019. Joko Widodo dalam pidato pelantikannya di MPR pada 20 Oktober 2014 menegaskan: “*kita telah terlalu lama memungguni laut, memungguni samudera, dan memungguni selat dan teluk, dan kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut justru kita jaya, sebagaimana semboyan kita di masa lalu, bisa kembali*”. Poros maritim merupakan gagasan untuk mengangkat kembali identitas bangsa sebagai suatu kekuatan maritim di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Melalui gagasan ini, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan potensi geografis, geostrategis, dan

⁶⁶ *Keynote Speech* oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Abdul Mochammad Fachir pada seminar penelitian yang diadakan pada 6 Oktober 2015 dengan tema “Diplomasi Pertahanan Indonesia: Keamanan Kawasan untuk Mendukung Poros Maritim”.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Muh Dimiyati, Kontribusi Strategis IPTEK untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, Slide ke-9

geoekonomi yang merupakan faktor penting bagi dinamika hubungan internasional di kedua samudera tersebut.⁶⁹

Gagasan poros maritim Presiden Jokowi tidak berhenti pada level abstraksi dan konseptualisasi. Gagasan itu menjadi operasional ketika *platform* Jokowi juga memuat sejumlah agenda konkret yang ingin diwujudkan dalam pemerintahannya ke depan. Misalnya, rencana pembangunan ”tol laut” untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim, mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kata lain, gagasan poros maritim juga bagian penting dari agenda pembangunan nasional.⁷⁰ Visi poros maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini mempunyai lima pilar. Pilar-pilar poros maritim akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

3.4 Pilar-Pilar Poros Maritim Indonesia

3.4.1 Membangun Budaya Maritim

Budaya kemaritiman bangsa Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejarah menunjukkan, kehidupan kemaritiman, pelayaran dan perikanan beserta kelembagaan formal dan informalnya merupakan kontinuitas dari proses perkembangan kemaritiman Indonesia masa lalu.⁷¹ Hal ini dapat dilihat berdasarkan penelitian, terdapat tipe jukung yang sama yang digunakan oleh orang-orang Kalimantan untuk berlayar. Situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan perahu layar, menggambarkan bahwa kita adalah keturunan bangsa pelaut sudah sekitar tahun 10.000 sebelum masehi.⁷² Sumber sejarah pelayaran Indonesia dalam masa prasejarah bisa dilihat dari relief di candi-candi Hindu dan Budha yang dibangun setelah tahun 500 Masehi, seperti Borobudur, Prambanan, dan lain-lain. Pada relief tersebut digambarkan bahwa pada masa itu sudah berlangsung perdagangan dan pelayaran

⁶⁹ Retno Lp Marsudi, “Diplomasi Poros Maritim Indonesia”, *Harian Kompas*, 20 Mei 2015.

⁷⁰ Rizal Sukma, 2015, Gagasan Poros Maritim Dunia” diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim> pada tanggal 16 Agustus 2015

⁷¹ Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi, Nomor 84 Tahun VIII, hal. 5

⁷² Rizky Kusumo, (2014), Resensi Novel: Arus Balik (*Pramoedya Ananta Toer*), Jakarta: Penerbit Mizan, hal. 56.

niaga. Pelayaran ini merupakan wujud aktivitas migrasi penduduk dalam jarak pendek. Disamping migrasi pada kawasan yang lebih jauh, terdapat juga aktivitas perhubungan laut bagi pengangkutan barang dagangan.⁷³

Pembangunan suatu bangsa mencakup seluruh aspek agar bangsa tersebut tidak tertinggal dari negara lainnya. Menjalankan pembangunan diawali dari mengetahui karakteristik bangsa itu sendiri. Karakteristik bangsa Indonesia dengan wilayahnya yang mayoritas lautan menjadi salah satu aspek pembangunan yang tidak bisa ditinggalkan. Pembangunan didasari dengan pembangunan fisik tidaklah cukup untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita dengan bangsa dengan bangsa lain seperti Inggris yang memiliki armada laut cukup kuat ataupun Tiongkok yang memfokuskan pembangunannya pada pesisir pantai. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan melalui pendidikan karakter mengenai kesadaran akan bangsa ini yaitu bangsa maritim.⁷⁴

Dunia maritim Indonesia telah mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Jika pada zaman dahulu mencapai kejayaan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, sekarang ini terlihat jelas terdapat kemunduran pada pengembangan wilayah kelautan. Indonesia yang mempunyai potensi laut sangat besar di dunia kurang begitu memperhatikan sektor ini. Padahal, laut menjadi salah satu faktor dalam mempertahankan eksistensi wilayah suatu negara. Terdapat empat komponen dasar menuju terciptanya *sea power* sebagai basis Negara Maritim yang akan digagas oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,⁷⁵ yaitu (1) masyarakat yang memiliki preferensi terhadap laut (*maritime community*), (2) sumberdaya maritim (sumberdaya laut, infrastruktur, perkapalan), (3) posisi geografis, dan (4) *political will* Pemerintah.

Nilai yang dapat dibawa dan diajarkan dalam pendidikan ini adalah nilai kemaritiman. Maksud dari penanaman nilai kemaritiman ini adalah membentuk watak penduduk daerah perbatasan sebagai penduduk yang ikut berperan aktif

⁷³*Ibid*

⁷⁴ Wawancara dengan Laksda Robert Mangindaan, Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, Plaza Senayan, 6 Agustus 2015.

⁷⁵ Pemaparan oleh Edy Prasetyono, pada seminar penelitian 6 Oktober 2015 dengan tema “Diplomasi Pertahanan Indonesia: Keamanan Kawasan untuk Mendukung Poros Maritim”.

dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, nilai-nilai kemaritiman yang ditanamkan pada pendidikan maritim adalah sebagai berikut⁷⁶ :

- 1) Cinta tanah air maritim
- 2) Budaya Bahari
- 3) Sejarah Bahari
- 4) Ekosistem Laut
- 5) Pemanfaatan Hasil laut, dll.

Nilai-nilai ini ditanamkan secara bertahap pada sekolah-sekolah formal dan informal di daerah, artinya pendidikan maritim ini di masukkan dalam kurikulum sekolah agar tertanam secara mendasar dalam jiwa peserta didik. Harapan dari suksesnya penanaman nilai-nilai ini yaitu peran aktif dan sadar ikut menjaga keutuhan NKRI.⁷⁷

3.4.2 Penjagaan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut

Kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah laut Indonesia juga belum mampu dikelola secara baik. Potensi sumberdaya kelautan yang Indonesia miliki sangat besar, tetapi sesungguhnya belum mampu dipahami nilai kemanfaatan ekonomi dan ekologisnya. Lebih jauh, ada kemungkinan bahwa sebagian potensi sumberdaya kelautan tersebut belum kita ketahui eksistensi keberadaannya di wilayah laut Nusantara.⁷⁸ Potensi sumberdaya wilayah laut Indonesia sangat berpeluang untuk menjadi modal dasar upaya mensejahterakan rakyat, termasuk kekayaan sumberdaya perikanan dan biota laut lainnya. Potensi perikanan laut Indonesia diperkirakan sekitar 6,4 juta ton pertahun. Selain itu laut Indonesia juga mempunyai potensi biodiversitas sebagai sumberdaya genetik atau bahan baku farmaseutikal; potensi sumberdaya minyak, gas, dan bahan tambang lainnya; potensi sumber energi terbarukan; dan potensi kepariwisataan.⁷⁹

⁷⁶ Soni Indrawanto, (2014), Pendidikan Karakter Maritim Sebagai Upaya Memperkuat Jiwa Kemaritiman Di Tingkat Satuan Pendidikan Yayasan Hang Tuah

⁷⁷ Benyamin Lakitan, (2012), " Pengelolaan Sumberdaya Kelautan berbasis Iptek untuk Kemakmuran Bangsa", Kementerian Riset dan Teknologi hal. 5

⁷⁸ Pemaparan oleh Laksda Robert Mangindaan, pada seminar penelitian 6 Oktober 2015 dengan tema "Diplomasi Pertahanan Indonesia: Keamanan Kawasan untuk Mendukung Poros Maritim".

⁷⁹ Samosir, A. P., Tenrini, R. H., & Nugroho, A, (2014), Analisis Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Perikanan Tangkap (*Analysis The Potential of Non-Tax Government Revenue From Fisheries Sector*). *Jurnal Borneo Administrator*, 10(2).

Keunikan posisi geografis Indonesia di antara dua kontinen dan dua samudera, serta dilintasi oleh garis katulistiwa dan rantai gunung api (*ring of fire*), merupakan kondisi yang menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Keunikan geografis dan kekayaan biodiversitas ekosistem laut Indonesia harus dijadikan modal untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak asing, sehingga diperlukan penjagaan dan pengawasan yang baik dalam mengelola sumberdaya laut Indonesia.⁸⁰

Pengelolaan sumberdaya kelautan perlu fokus pada aktivitas memanfaatkan kekayaan sumberdaya yang dimiliki untuk menyejahterakan rakyat, yang diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutannya dengan mematuhi kaidah-kaidah ekologis. Teknologi yang dikembangkan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kearifan ekologi. Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, Indonesia dalam visi poros maritim dunia memfokuskan pada beberapa hal yang akan menjadi program pembangunan kemaritiman Indonesia seperti, (a) Teknologi penangkapan ikan, budidaya ikan dan biota laut, serta teknologi pengolahannya; (b) (Bio) teknologi untuk memanfaatkan biodiversitas sebagai sumber bahan baku industri dan sumber tetua untuk program pemuliaan tanaman dan ikan atau biota laut lainnya; (c) Teknologi eksplorasi dan eksploitasi migas, bahan tambang lainnya dan sumberdaya energi terbarukan; dan (d) Teknologi konservasi sumber daya kelautan, yang dapat juga dilebarkan cakupannya pada potensi pengelolaannya untuk pariwisata bahari.⁸¹

3.4.3 Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Maritim

Infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan, termasuk pembangunan dan pengembangan di sektor maritim. Bentuk kesiapan infrastruktur untuk menunjang pembangunan sektor maritim salah satunya adalah dengan membangun dan membenahi fungsi kepelabuhan di pusat-pusat ekonomi. Pelabuhan dapat menciptakan konektivitas maritim yang

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹ M.J.M., Bottema dan Bush, S.R. (2012), "The Durability of Private Sector-led Marine Conservation: A case study of two entrepreneurial marine protected areas in Indonesia", *Ocean and Coastal Management*. Hal. 38

berfungsi sebagai alur interaksi ekonomi maupun interaksi pada bidang-bidang lainnya. Jika hal ini diterapkan, tentunya akan sejalan dengan program percepatan pembangunan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Dalam MP3EI, penguatan konektivitas nasional dan internasional merupakan salah satu program utama yang akan dikedepankan. Oleh karena itu, sinergitas program pembangunan dan pengembangan sektor maritim dengan program penguatan konektivitas antar wilayah harus dilakukan, dalam rangka memanfaatkan posisi Indonesia yang terhubung dengan pusat-pusat perekonomian regional dan global.⁸²

Selain membangun industri pendukung, pembenahan terhadap sejumlah permasalahan mendasar di sektor kelautan akan dilakukan agar dapat mempercepat pengembangan sektor maritim.⁸³ Adapun upaya dalam mewujudkan Penguatan Konektivitas Nasional (*locally integrated, internationally connected*) adalah dengan merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*), mewujudkan sinergi antar pusat pertumbuhan, serta mewujudkan akses pelayanan yang merata, meliputi⁸⁴:

1. Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan (tol laut), yang akan menjadi titik utama sebagai jaringan pelayaran domestik untuk pergerakan barang. Pelabuhan-pelabuhan utama akan terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan pengumpan (*Feeder*) yang fungsinya sebagai pendukung pelabuhan pelabuhan utama.
2. Konektivitas internasional, memperbanyak akses pintu masuk jalur perdagangan dan wisatawan,
3. Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (akses, infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar yang merata di seluruh Indonesia difokuskan pada pelabuhan utama dan komersial), dan kecukupan listrik, komunikasi, sarana dan pra-sarana transportasi (akses jalan dan kendaraan–kereta dan mobil angkutan *feeder* pendukung).

⁸² Muh. Dimiyati, 10 Desember 2014, “Kontribusi Strategis Iptek Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dunia”, deputy Sumber Daya Iptek, Kemenristek Dan Dikti, Jakarta, hal.28

⁸³ *Keynote Speech* oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Abdul Mochammad Fachir pada seminar penelitian yang diadakan pada 6 Oktober 2015 dengan tema “Diplomasi Pertahanan Indonesia: Keamanan Kawasan untuk Mendukung Poros Maritim”.

⁸⁴ T. Ade Surya, (2014), “Optimalisasi Pembangunan Kemaritiman Nasional”, Vol. VI, No. 20/II/P3DI/Okttober/2014, Jakarta, hal. 15

3.4.4 Kerja Sama Maritim Melalui Diplomasi

Kerjasama sama maritim Indonesia dilakukan pada kawasan regional dan internasional yang akan bergerak pada berbagai bidang di bidang infrastruktur maritim, energi, perikanan dan pelestarian lingkungan bahari. Pada tingkat bilateral, kerjasama maritim juga akan dikembangkan dalam kerangka kemitraan strategis dan komprehensif dengan negara sahabat. Melalui diplomasi maritim, Indonesia mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan ini. Berbagai permasalahan yang muncul harus diatasi dengan menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam visi misinya telah menegaskan tekad untuk merealisasikan ajaran Trisakti; yaitu menjadikan Indonesia berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, sehingga laut dianggap harus menyatukan, bukan memisahkan dengan negara-negara lainnya.⁸⁵

Dengan politik bebas aktif, diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Diplomasi Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai negara maritim dan akan menggunakan posisi strategis diantara Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat. Diplomasi Indonesia akan membumi serta diplomasi Indonesia akan dilakukan secara tegas dan bermartabat. Indonesia akan membuka peluang kerjasama maritim melalui diplomasi baik bilateral maupun multilateral.⁸⁶

Salah satu bentuk kerjasama maritim yang dilakukan oleh Indonesia adalah membangun infrastruktur pelabuhan di Indonesia yang masih perlu dikembangkan dan Indonesia membuka peluang seluasnya bagi kerjasama kemaritiman dengan negara sahabat⁸⁷ termasuk Rusia pada pertemuan antara Kementerian luar negeri RI dan Rusia di Moskow bulan Mei 2015. Selain dengan

⁸⁵ Kemlu.Go.Id, (2015), "Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia", Jakarta Hal. 4 Diakses Melalui [Http://www.Kemlu.Go.Id/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=112&L=Id](http://www.Kemlu.Go.Id/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=112&L=Id) Pada 19 Agustus 2015

⁸⁶*Ibid.*, hal.6

⁸⁷ News.detik.com, "Dialog Kebijakan Indonesia, Buka Peluang Kerjasama Maritim dengan Rusia", diakses melalui <http://news.detik.com/read/2015/05/16/033147/2916205/10/dialog-kebijakan-indonesia-buka-peluang-kerja-sama-maritim-dengan-rusia> Pada 19 Agustus 2015

Rusia, Indonesia juga membuka peluang kerjasama maritim melalui jalan diplomasi dengan pemerintah Panama di berbagai sektor kemaritiman, seperti pengelolaan pelabuhan, perlindungan pelaut dan *capacity training*. Dalam pertemuan dengan kantor Otoritas Maritim Panama, dibahas kerjasama di bidang kemaritiman diantaranya perlindungan Anak Buah Kapal (ABK), sertifikasi pelaut, pengelolaan pelabuhan, registrasi kapal, *IUU Fishing* serta potensi perdagangan antara Indonesia dan Panama.⁸⁸

Indonesia juga ikut mendorong kerja sama di bidang maritim di antara negara-negara anggota ASEAN, di mana hal itu sesuai dengan visi-misi pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Keinginan Indonesia untuk adanya kerjasama maritim itu dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Kota Kinabalu pada 28 Januari 2015. Pada pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan kerjasama maritim dapat diperluas hingga mencakup bidang-bidang, seperti konektivitas maritim dan pemberantasan penangkapan hasil laut secara ilegal (*Illegal Unreported and Unregulated Fishing*). Indonesia juga mengusulkan kerja sama maritim di bidang lain yang lebih luas, antara lain Kerjasama Praktis Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana, Penyelesaian Perbatasan Maritim dan Sengketa Teritorial, operasi SAR.⁸⁹

3.4.5 Pembangunan Kekuatan Pertahanan Maritim

Untuk mewujudkan negara maritim besar dan menjadikan poros maritim dunia, Indonesia wajib mewujudkan laut aman dari ancaman pelanggaran wilayah dari pihak luar, aman dari bahaya navigasi pelayaran, aman dari eksploitasi ilegal sumber daya alam serta pencemaran lingkungan, dan aman dari tindakan pelanggaran hukum. Unsur dukungan berupa armada niaga, armada kedinasan (Bakamla/Badan Keamanan Laut), armada logistik (poros laut), armada angkatan laut, serta angkatan pekerja maritim, dipercaya mampu memperkuat sektor kelautan menuju penguatan poros maritim yang terkoneksi secara terpadu. Hal

⁸⁸ Kemlu.go.id, "Indonesia Buka Peluang Kerja Sama Maritim dan Ekonomi dengan Panama" diakses melalui <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7535&l=id> Pada 20 Agustus 2015

⁸⁹ Antaranews.com, "Indonesia Dorong Kerjasama Maritim di ASEAN", diakses melalui <http://www.antaranews.com/berita/476879/indonesia-dorong-kerja-sama-maritim-di-asean> pada 20 Agustus 2015

lainnya adalah kewajiban adanya pengembangan lebih besar, seperti pada sektor armada perang.⁹⁰

Indonesia harus membentuk sistem pertahanan maritim yang kokoh dan mampu menangkal segala ancaman yang muncul sebagai akibat dari perkembangan lingkungan strategis. Terwujudnya pertahanan maritim yang handal dapat memberikan efek gentar atau *deterrence effect* bagi negara lain dan mampu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam konstelasi politik baik di tingkat regional maupun global.⁹¹ Indonesia harus membangun pertahanan yang kuat dengan Alutsista (alat utama sistem pertahanan) yang canggih dan modern. Salah satu upaya perwujudannya adalah dengan pembangunan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Pembangunan pertahanan negara tidak hanya ditujukan pada pertahanan militer yang bersifat fisik saja, namun juga membangun dan disinergikan dengan pertahanan nirmiliter yang bersifat non fisik sebagai wujud kesemestaan. Dari aspek non fisik, perlu terus dibangun kesadaran bela negara yang kokoh bagi para prajurit dan segenap warga negara Indonesia.⁹²

Sasaran Kebijakan Pertahanan maritim Indonesia Tahun 2015 akan memfokuskan diri pada peningkatan pembangunan Alutsista, sarana prasarana, profesionalisme dan kesejahteraan, peningkatan industri pertahanan dan penguasaan teknologi, peningkatan kerjasama pertahanan dan misi pemeliharaan perdamaian dunia, pengembangan pemberdayaan wilayah pertahanan, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dengan menyusun konsep sabuk pengamanan (*security belt*) yang terpadu, meningkatkan kemampuan Kemhan/TNI dalam menghadapi ancaman nyata seperti terorisme, bencana alam dan wabah penyakit, menjadikan kesadaran bela negara sebagai gerakan nasional (revolusi mental bidang pertahanan).⁹³

⁹⁰ Edy Prasetyono, 2015, "Menjadi Poros Maritim Dunia, Indonesia Harus Menjadi Referensi Dunia Maritim, Budaya Dan Ilmu Pengetahuannya", Program pasca sarjana Ilmu hubungan internasional, universitas Indonesia, hal. 34

⁹¹*Ibid.*, hal. 39

⁹²Pemaparan oleh Edy Prasetyono, pada seminar penelitian 6 Oktober 2015 dengan tema "*Diplomasi Pertahanan Indonesia: Keamanan Kawasan untuk Mendukung Poros Maritim*", Universitas Budi Luhur. Jakarta.

⁹³ Jurnalmaritim.com, "Strategi Maritim Untuk Pertahanan Indonesia, diakses melalui <http://jurnalmaritim.com/2014/11/strategi-maritim-untuk-pertahanan-indonesia/> pada 12 Juni 2015 pukul 05.08 WIB

Adapun upaya pembangunan pertahanan kekuatan maritim Indonesia mencakup beberapa hal, seperti dibawah ini⁹⁴:

1. Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan agar negara dapat mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan yang diarahkan pada pembangunan postur pertahanan negara, pengintegrasian sistem pertahanan negara, pembangunan kelembagaan, pembangunan Industri Pertahanan, pembangunan berbasis teknologi, kerjasama internasional, pembangunan sumber daya manusia, dan pemberdayaan wilayah pertahanan.
2. Pemberdayaan pertahanan negara dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara yang dalam rangka menghadapi ancaman.
3. Pengerahan kekuatan pertahanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama yang menyangkut tataran kewenangan dan tanggung jawab pengerahan.
4. Pembangunan legislasi melalui percepatan proses pelaksanaan Program Legislasi Nasional bidang pertahanan.
5. Pelaksanaan anggaran pertahanan negara secara tepat dan komprehensif terhadap semua kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan kemampuan pertahanan negara.
6. Pengawasan sebagai fungsi manajemen diberdayakan secara sinergis dalam bentuk pengawasan internal dan eksternal yang sudah melembaga sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹⁴ Kemhan.go.id, Rapim Kemhan Tahun 2015: Kemandirian Industri Pertahanan, Semangat Bela Negara dan Jiwa Kemaritiman diakses melalui <http://puskompublik.kemhan.go.id/post-rapim-kemhan-tahun-2015--kemandirian-industri-pertahanan-semangat-bela-negara-dan-jiwa-kemaritiman.html> pada 12 Juni 2015 pukul 05.18 WIB

3.5 Kesimpulan

Sesuai dengan pilar-pilar yang terkandung pada visi poros maritim dunia, Indonesia harus mempunyai agenda untuk mulai memperbaiki beberapa aspek yang merupakan syarat tercapainya visi tersebut, antara lain pembangunan kekuatan pertahanan maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut, pembangunan budaya maritim, dan kerja sama maritim melalui diplomasi. Konsep mengenai Indonesia sebagai negara maritim selama ini hanya diterima sebagai identitas yang melekat dalam diri bangsa Indonesia.

Konsep ini kurang dijadikan sebagai landasan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Selain itu belum ada pemahaman yang sinergis antara konsep serta operasionalisasi visi poros maritim dunia. Penelitian dan peningkatan kapabilitas yang dilakukan terkait dengan pengembangan sumber daya kelautan jumlahnya lebih sedikit daripada daratan. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan proyeksi Indonesia yang belum mengembangkan kapabilitas pengamanan laut yang memadai, sehingga pembenahan di bidang ini sangat diperlukan mengingat luas wilayah kelautan yang dimiliki. Dalam upaya mewujudkan visi poros maritim dunia Indonesia harus membentuk sistem pertahanan maritim yang kokoh dan mampu menangkal segala ancaman yang muncul sebagai akibat dari perkembangan lingkungan strategis.

BAB 4

ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA

4.1 Skenario Perkembangan Lingkungan Strategis pada Konflik Laut Cina Selatan

Dalam upaya menganalisis pola lingkungan strategis di suatu kawasan, dibutuhkan jawaban atas beberapa pertanyaan utama. Pertanyaan tersebut meliputi pihak-pihak mana saja yang berkepentingan di wilayah tersebut, hal-hal apa saja yang bisa dieksploitasi dan keuntungan yang didapat, kompetitor utama mereka, apa yang dilakukan, serta potensi ancaman maupun konflik-konflik potensial yang bertensi tinggi.⁹⁵ Aktor-aktor yang terlibat dalam sengketa ini antara lain negara-negara pengklaim dan negara non pengklaim yang mempunyai kepentingan di wilayah tersebut. Sengketa di Laut Cina Selatan yang melibatkan enam negara secara langsung, yaitu Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Viet Nam terkait dengan klaim masing-masing pihak terhadap Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Secara tidak langsung, sengketa di perairan tersebut akan melibatkan pula pihak-pihak lain yang terkena *spill over*, seperti Amerika Serikat yang sangat menjunjung tinggi kebebasan bernavigasi.

Tiongkok merupakan negara yang mempunyai keinginan paling besar untuk menguasai seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Tiongkok bertindak lebih agresif dan beberapa kali terlibat bentrokan senjata di wilayah yang sedang dipersengketakan dengan Viet Nam dan Filipina. Tiongkok telah menetapkan bahwa Laut Cina Selatan merupakan “*core national interest*”. Hal ini dinyatakan oleh Dai Bingguo, Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok.

*“The PRC’s first core interest is maintaining its fundamental system and state security, second is state sovereignty and territorial security, second is state sovereignty and territorial integrity and the third is the continued stable development of the economy and society... in specific terms, Tibet, Xianjiang, Taiwan and South China Sea island as well”*⁹⁶

⁹⁵ John Peterson, “*The Strategic Environment*”, diakses melalui <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/strat-ldr-dm/pt1ch2.html> pada tanggal 10 April 2015

⁹⁶ Lo, Chi. Kin, (2003), *China's Policy towards territorial disputes: the case of the South China Sea Islands*, London: Routledge, hal. 25.

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Amerika Serikat mengingat jalur tersebut merupakan jalur lalu lintas perdagangan AS. Lebih lanjut lagi, Hillary Clinton Menteri Luar Negeri AS menyatakan:

*“The United States, like every nation, has a national interest in freedom of navigation, open access to Asia’s maritime commons and respect for international law in the South China Sea”.*⁹⁷

Tanggapan dari kedua negara ini tentunya menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia Pasifik. Hal ini menyebabkan Tiongkok dan Amerika Serikat dijadikan sebagai polaritas utama pada konflik tersebut.

Konflik ini kemudian menjadi titik tumpu geopolitik di kawasan Asia Pasifik yang juga menjadi suatu permasalahan internasional karena menyebabkan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Hingga akhir tahun lalu, sengketa wilayah Laut Cina Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai. Polarisasi ini terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara tersebut sama-sama memiliki kepentingan terhadap Laut Cina Selatan, keduanya saling berinteraksi dengan sekaligus membuat polarisasi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai *regional power* harus dapat menentukan strategi bahkan sikap untuk menghadapi keadaan ini. Hal ini diperlukan agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat tetap menjalin kerjasama diantara keduanya tanpa terpengaruh oleh polarisasi yang diciptakan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan tersebut.

Konflik di Laut Cina Selatan dipastikan akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas kawasan Asia Pasifik, karena pihak-pihak yang berhadapan merupakan kekuatan besar di kawasan. Jika dilihat dalam dimensi kesejahteraan, konflik ini selain akan berimplikasi terhadap segi perekonomian kawasan. Konflik ini secara langsung berimbas terhadap kebebasan navigasi jalur perdagangan dunia. Diperlukan adanya pengamanan yang kuat terhadap kapal-kapal dagang yang melewati jalur ini sehingga tidak akan menghambat

⁹⁷ Clinton Hillary, (2008), “Security and Opportunity for the Twenty-First Century,” artikel dalam *Foreign Affairs*, edisi Januari-Februari 2008.

perkembangan investasi dan perdagangan yang melewati jalur ini dan sekitarnya. Kapal-kapal dagang akan melintasi perairan yang lebih aman namun akan menimbulkan peningkatan terhadap pengeluaran distribusi barang dan jasa. Dinamika di Laut Cina Selatan saat ini menunjukkan kecenderungan sulitnya mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan di perairan tersebut, baik negara-negara pengklaim maupun negara pengguna perairan itu. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan sejak dini harus mempunyai strategi nasional untuk mengantisipasi eskalasi konflik.

Indonesia meskipun bukan merupakan negara yang turut mengklaim di Laut Cina Selatan, tetap mempunyai kepentingan di perairan itu. Kepentingan tersebut setidaknya ada dua, yaitu mencegah *spill over* konflik ke wilayah kedaulatannya dan memperkuat klaim wilayah ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Laut Natuna. Seperti diketahui, dalam peta yang diterbitkan oleh Tiongkok pada 1992 klaim Tiongkok sampai merambah ke wilayah ZEE Indonesia yang ditandai dengan adanya sembilan garis putus-putus. Selain itu urgensi keterlibatan Indonesia pada konflik di Laut Cina Selatan terlihat ketika Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya memunculkan konsep poros maritim yang mengharuskan Indonesia menyelenggarakan tata tertib di laut dan menciptakan keamanan maritim di dunia dan di kawasan.

Jika dianalisis melalui dimensi kedaulatan, telah terjadi *spill over* konflik Laut Cina Selatan hingga memungkinkan terganggunya wilayah dan zona maritim Indonesia. Oleh karena itu dapat dikatakan terdapat ancaman serius pada kedaulatan Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam pengelolaan potensi konflik dibutuhkan agar ancaman tersebut tidak berkembang menjadi lebih luas dan tidak memunculkan ketidakpastian strategis yang menyebabkan terjadinya instabilitas keamanan kawasan. Diperlukan tinjauan komprehensif kembali oleh pihak-pihak terkait terhadap strategi *status quo* yang dipilihnya, sehingga Indonesia dapat mempersiapkan strategi lain untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan datang.

4.1.1 Dinamika Pola Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok dalam Konflik Laut Cina Selatan

Isu politik dan keamanan di Laut Cina Selatan tidak dapat lepas dari bingkai persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, meskipun Amerika Serikat bukan negara yang mengklaim wilayah di perairan tersebut. Tentu menjadi pertanyaan mengapa Amerika Serikat berkepentingan dengan Laut Cina Selatan? Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama dan diterbitkan pada Februari 2010 menyatakan bahwa “*Our national security strategy is, therefore, focused on renewing American leadership so that we can more effectively advance our interests in the 21st century*”. Himbuan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dalam pertemuan ASEAN di Hanoi berada dalam bingkai tersebut, yang apabila diturunkan pada tingkat mikro akan terkait dengan kebebasan bernavigasi bagi kapal Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki kebijakan luar negeri tersendiri dalam keterlibatannya di konflik Laut Cina Selatan, dimana Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ini disampaikan oleh *US State Departement Spokesperson* yang mencakup 5 elemen yakni :

1. *Peaceful Resolution of the Disputes* : “*The United States strongly opposes the use or threat of force to resolve competing claims and urges all claimants to exercise restraint and avoid destabilizing actions*”
2. *Peace and Stability* : “*The United States has abiding interest in maintenance of peace and stability in the South China Sea*”
3. *Freedom of Navigation* : “*Maintaining freedom of navigation is a fundamental interest of US. Unhindered navigation by all ships and aircraft in the South China Sea is essential for the peace and prosperity of the entire Asia- Pacific region, including the US.*
4. *Neutrality in disputes* : “*The United States takes no position on the legal merits of the competing claims to sovereignty over the various island, reefs, atolls, and cays in the South China Sea*”
5. *Respect of International principles* : “*The US would, however, view with serious concern any maritime claim or restriction on maritime activity in*

*the South China Sea that was not consistent with international law including the 1982 UNCLOS.*⁹⁸

Sebagai pihak yang diminta untuk turut aktif dalam penyelesaian konflik ini, Amerika Serikat telah memulai strategi militer "poros" menuju Asia. Amerika Serikat telah menyatakan niatnya untuk membuat "poros" gerakan pergeseran kekuatan dan strategi mereka ke Asia, dan konflik ini menempatkan banyak tekanan pada kekuatan ekonomi yang muncul. Viet Nam dan Filipina telah meminta Amerika Serikat untuk meningkatkan kehadirannya dalam rangka untuk mengimbangi naiknya kekuatan Tiongkok. Viet Nam dan Filipina bahkan meningkatkan dua kali lipat anggaran pertahanan pada tahun 2014 dan dianggap sebagai rencana latihan militer gabungan lima tahun dengan Amerika Serikat⁹⁹.

Persaingan kedua negara ini juga tampak dalam usahanya menyebarkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Tiongkok telah memiliki peluang untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dikarenakan kedekatannya baik secara geografi maupun dengan berbagai kerjasama yang dilakukan dengan kawasan ini. Untuk itu, konflik Laut Cina Selatan ini dipandang Amerika Serikat sebagai pintu masuk untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara, peluang Amerika Serikat ini pertama muncul karena sengketa ini kemudian menimbulkan hubungan yang kurang baik antara Tiongkok dan negara Asia Tenggara seperti Viet Nam dan Filipina. Selain itu dengan diundang turut campur dalam konflik ini, Amerika Serikat dapat memanfaatkannya, dengan memperkuat relasi keamanan, ikatan pertahanan dan membentuk aliansi serta memperoleh dukungan dari kawasan Asia Tenggara.

Amerika Serikat bahkan mendapat dukungan dari negara ASEAN lainnya yang tidak berkonflik untuk turut serta dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan, dukungan ini didapat dari beberapa negara seperti Indonesia.¹⁰⁰ Sayangnya keberadaan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan ini belum juga dapat membantu menyelesaikan konflik yang ada. Adanya aktor

⁹⁸ Fravel, T, (2012), *South China Sea : What Issue and Whose Core Interest* , 6th Berlin Conference on Asia Security, Berlin: Konrad Adenauer Stiftung.

⁹⁹ Ralf Emmers, (2014), *The New US Strategy Towards Asia: Adapting to the American Pivot*, New York: Routledge. Hal, 143.

¹⁰⁰ Buszynski, (2012), *The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and US-China Strategy Rivalry*, *The Washington Quarterly* , 139 .

eksternal dalam hal ini Amerika Serikat menyebabkan kepentingan yang ada didalam konflik ini semakin meluas. Amerika Serikat dengan strategi militer porosnya memiliki kepentingan tersendiri untuk menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga menghambat proses mediasi yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan karena kepentingan Amerika Serikat yang utama bukan hanya penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Selain itu sikap Tiongkok yang berubah semakin agresif dalam menghadapi konflik ini dengan meningkatkan kapabilitasnya khususnya sejak masuknya Amerika Serikat dalam konflik ini. Bahkan kerjasama dan pelatihan militer yang dilakukan Amerika Serikat dengan Filipina dapat meningkatkan tingkat eskalasi konflik karena dapat menimbulkan kecurigaan dan ketegangan negara lain yang terlibat konflik di kawasan Laut Cina Selatan.

Secara tidak langsung Amerika Serikat dan Tiongkok telah berupaya untuk saling menyebarkan pengaruh di kawasan (*Balance of Influence*). Oleh karena itu, sikap terbaik yang seharusnya dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara adalah dengan melakukan *hedging*. Hal ini seperti ditegaskan Goh dalam tulisannya yang berjudul *Understanding 'Hedging' in Asia-Pacific Security*, menjelaskan strategi *hedging* sebagai:

*"a set of strategies aimed at avoiding (or planning for contingencies in) a situation in which states cannot decide upon more straightforward alternatives such as balancing, bandwagoning, or neutrality. Instead they cultivates a middle position that forestalls or avoids having to choose one side [or one straightforward policy stance] at the obvious expense of another"*¹⁰¹

Terdapat kekhawatiran akan terjadinya ketidakstabilan sistem multipolar di kawasan tersebut oleh negara-negara kecil dan menengah dikarenakan adanya persaingan kepentingan antara negara hegemon (Tiongkok) dan *balancer* (Amerika Serikat) di dalam kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu negara-negara kecil di kawasan Asia Tenggara seharusnya menggunakan strategi *hedging* sebab tidak memungkinkan untuk menggunakan strategi *balancing* dan *bandwagoning* secara murni dengan negara-negara kuat.

¹⁰¹ Evelyn Goh, (2006) *Understanding "hedging" in Asia-Pacific Security*, Working paper yang diajukan pada Pacific Forum CSIS, Honolulu, Hawaii pada tanggal 31 Agustus. Hal 1.

Namun, yang terjadi saat ini adalah negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia belum secara tegas menentukan strateginya. Dalam konteks permasalahan di Laut Cina Selatan, Tiongkok lebih suka pendekatan bilateral daripada upaya-upaya yang mengarah kepada pendekatan multilateral. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Tiongkok Liang Guanglie pada saat membahas masalah Laut Cina Selatan dengan para pemimpin dari Indonesia dan Filipina selama kunjungannya ke tiga negara Asia Tenggara pada akhir bulan Mei 2011. Liang Guanglie menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang dapat menjadi mediator dalam perundingan tersebut, hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai nilai-nilai moderat dan damai.¹⁰² Sebaliknya, Amerika Serikat menilai pemecahan masalah ini harus dilakukan secara multilateral. Senator AS Jim Webb mengatakan peran Indonesia yang bertindak sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN sangat tepat untuk mengupayakan pemecahan masalah ini secara multilateral.¹⁰³ Kontradiksi ini tentunya akan menyulitkan negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia karena harus mengakomodir semua kepentingan Tiongkok dan Amerika Serikat yang bertentangan. Hal ini akan menimbulkan kesan *bandwagoning* ke segala pihak, baik ke negara *hegemon* maupun *balancer*.¹⁰⁴

4.1.2 Dinamika Perkembangan Persenjataan Asia Pasifik dan Tenggara

Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah di Asia Tenggara yang hingga kini masih disengketakan statusnya. Berbagai negara mengklaim wilayah Laut Cina Selatan seperti Tiongkok, Taiwan, Filipina, Viet Nam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Masing-masing negara memiliki argumen terkait klaim wilayah Laut Cina Selatan ini. Terlepas dari argumen yang digunakan beberapa negara untuk mengklaim wilayah tersebut, beberapa negara memiliki cara untuk mempertahankan klaimnya yaitu salah satunya dengan meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan mereka dengan memperbaharui persenjataannya.

¹⁰² Hayley Roberts, (2015), "Responses to Sovereign Disputes in the South China Sea", *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 30(1), 199-211.

¹⁰³

¹⁰⁴ Wawancara dengan Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM), Plaza Senayan, 6 Agustus 2015.

Proses transformasi pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara menghasilkan salah satu paradoks yang muncul di kawasan. Paradoks tersebut adalah realita bahwa kematangan institusionalisasi ASEAN tetap tidak mampu meredam keinginan negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam memperkuat kapabilitas pertahanannya. Menurut laporan SIPRI tahun 2014 (*Stockholm International Peace Research Institute*) indikasi adanya proliferasi senjata secara ofensif ini didukung dengan adanya kecenderungan belanja militer negara-negara utama di kawasan ini yang meningkat tiap tahunnya.¹⁰⁵ Peningkatan belanja militer ini cenderung ditujukan untuk memperbesar kapasitas proyeksi kekuatan militer di luar batas negara.¹⁰⁶ Selain itu tren modernisasi ini dapat dilihat dari meningkatnya kecanggihan teknologi, sumberdaya yang semakin beragam, pengenalan kapabilitas baru, penekanan pada perlindungan sumberdaya alam (khususnya sumberdaya maritim) dan tren perlombaan akuisisi senjata di Asia Tenggara.¹⁰⁷

Terdapat dua faktor dalam peningkatan modernisasi persenjataan di kawasan Asia Tenggara, yaitu faktor penggerak (*driver*) dan faktor yang memungkinkan (*enabler*). Faktor penggerak yaitu adanya ketegangan regional, kebutuhan proyeksi kekuatan baru, pergeseran aktivitas militer Amerika Serikat ke Asia dan semakin meningkatnya kehadiran Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sedangkan faktor yang memungkinkan (*enabler*) yaitu kemampuan negara-negara Asia Tenggara dalam melakukan modernisasi militernya dengan meningkatkan anggaran pertahanan negara yang disebabkan oleh meningkatnya perekonomian dan sisi penawaran yang besar yaitu “pasar pembeli” untuk persenjataan.¹⁰⁸

Hal ini dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara dengan membeli sistem persenjataan yang berkarakter ofensif yang terbagi kedalam empat jenis sistem persenjataan. Pertama, Singapura, Malaysia Indonesia, Viet Nam, dan Thailand sama-sama membeli pesawat tempur generasi 4. Singapura membeli *F-15* dan *F-16* dengan teknologi baru dari Amerika Serikat, sedangkan Malaysia,

¹⁰⁵ SIPRI, Military Expenditure Data 2014, diakses dari <http://milexdata.sipri.org/> pada 10 Agustus 2015.

¹⁰⁶ Edy Prasetyono, Andi Widjajanto, Makmur Keliat, (2012), *Dinamika Persenjataan dan Revitalisasi Industri Pertahanan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 12

¹⁰⁷ Andrew Tan, (2004), *Force Modernisation Trends in Southeast Asia*, Singapore : Institute of Defense and Strategic Studies, hal. 3.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Indonesia membeli *Su-27* dan *Su-30MK* dan Viet Nam membeli *Su-27* dan *Su-30* dari Rusia dan Thailand membeli *Gripens* dari Swedia. Kedua, Malaysia dan Singapura membeli *main battle tanks* dari Polandia dan Jerman, sedangkan Indonesia berencana membeli tank *Leopard-2* yang nantinya akan diletakkan di daerah perbatasan. Ketiga, Indonesia, Singapura, dan Thailand telah sama-sama memperkuat kapasitas kekuatan proyeksi maritimnya. Indonesia dan Singapura membeli kapal perang *Frigate* dari Belanda yang mempunyai teknologi *stealth* (siluman), Thailand bahkan telah memiliki kapal induk *Chakri Nareubet* (10.000 ton) yang dibuat Spanyol. Keempat, Malaysia, Singapura dan Viet Nam sama-sama memiliki kapal selam terbaru buatan Perancis, Swedia dan Rusia. Indonesia juga telah bekerja sama dengan Korea Selatan untuk membangun 3 kapal selam kelas U-209 untuk melengkapi 2 kapal selam buatan Jerman.¹⁰⁹

Thailand. Thailand akan meningkatkan belanja militernya dari 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 menjadi 1,8 persen tahun 2016. Alutsista yang banyak dipesan adalah sistem canggih pertahanan seperti pesawat tempur, helikopter militer, kendaraan lapis baja, alat-alat pengintai, kapal perang dan kapal selam. Investasi pertahanan yang signifikan juga dilakukan pada peralatan untuk melawan ancaman keamanan maritim.¹¹⁰

Filipina. Dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, Filipina termasuk kecil dalam hal luas wilayah dan populasinya. Namun negara ini memiliki 7,100 pulau dan merupakan negara ketiga dengan garis pantai terpanjang. Filipina pada Desember 2014 menyetujui pengeluaran pemerintah sebesar 2,6 triliun Peso atau sekitar 59 milyar dollar AS untuk memodernisasi militer mereka. Anggaran sebesar 39 milyar Peso atau sekitar 885 juta dollar AS digunakan untuk membeli 3 kapal cepat dengan peluru kendali pemandu, 2 *frigate stealth*, dan 2 helikopter anti kapal selam. Selain itu, pada Januari 2015 Departemen Pertahanan Nasional Filipina mendapatkan dana sebesar 144,5 milyar Peso atau sekitar 3,3 milyar dollar AS untuk pembelian 2 pesawat Hercules C-130.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Carl Thayer, (2015), The Philippines, Malaysia, Thailand and Vietnam Race to South China Sea Defense Modernization, <http://thediplomat.com/2015/01/the-philippines-malaysia-and-Viet-Nam-race-to-south-china-sea-defense-modernization/> diakses tanggal 22 Agustus 2015

¹¹¹ *Ibid.*

Pada bulan Oktober 2014, Perdana Menteri Najib Razak mengumumkan bahwa anggaran pertahanan Malaysia akan meningkat 10% menjadi 5,4 milyar dollar AS pada tahun 2015. Pada saat yang sama, anggaran pengadaan dan penelitian pertahanan juga akan meningkat sebesar 6% menjadi lebih dari 1 milyar dollar AS. Peningkatan belanja pertahanan Malaysia ini dirancang untuk menghadapi 2 ancaman yaitu: ancaman keamanan dari Filipina selatan dan agresifitas Tiongkok di laut sekitar James Shoal. Dana pertahanan Malaysia ini akan digunakan untuk merelokasi 19 pesawat tempur ringan ke pulau Labuan. Kepala Angkatan Laut Malaysia, Laksamana Aziz Jaafar, mengungkapkan pada tanggal 7 Januari 2015 bahwa angkatan laut Malaysia telah mengalokasikan dana sebesar 2,86 milyar dollar AS. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan 8 korvet rudal, 6 helikopter anti-kapal selam serta untuk penggantian torpedo dan sistem rudal di kapal angkatan laut¹¹².

Viet Nam terlibat dalam putaran intens diplomasi pertahanan pada Desember 2014 - Januari 2015. Diplomasi pertahanan ini melibatkan kunjungan pelabuhan angkatan laut, dialog pertahanan, dan pertukaran delegasi tingkat tinggi yang melibatkan tiga negara regional lainnya yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina di samping Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pengeluaran militer Viet Nam telah meningkat 83% selama lima tahun terakhir, kapabilitas angkatan lautnya juga telah dua kali lipat lebih besar yaitu mencapai 68 kapal *frigate* setelah sebelumnya 33 kapal *frigate*. Viet Nam juga telah memesan beberapa kapal selam dari Rusia serta beberapa pesawat pengintai. 6 kapal selam tiba tahun ini dan 6 sisa kapal selam lainnya akan tiba tahun 2016.¹¹³ Agenda pembelian ini merupakan hasil diskusi dari kunjungan PM Viet Nam Nguyen Tan Dung ke Rusia dan dari kontrak kerjasama penyediaan kapal selam antara Viet Nam-Rusia di tahun 2009 sebesar 2 milyar dollar AS. Namun Viet Nam menyatakan secara tegas bahwa pembelian alat-alat pertahanan ini tidak memiliki tujuan mengancam kawasan.¹¹⁴

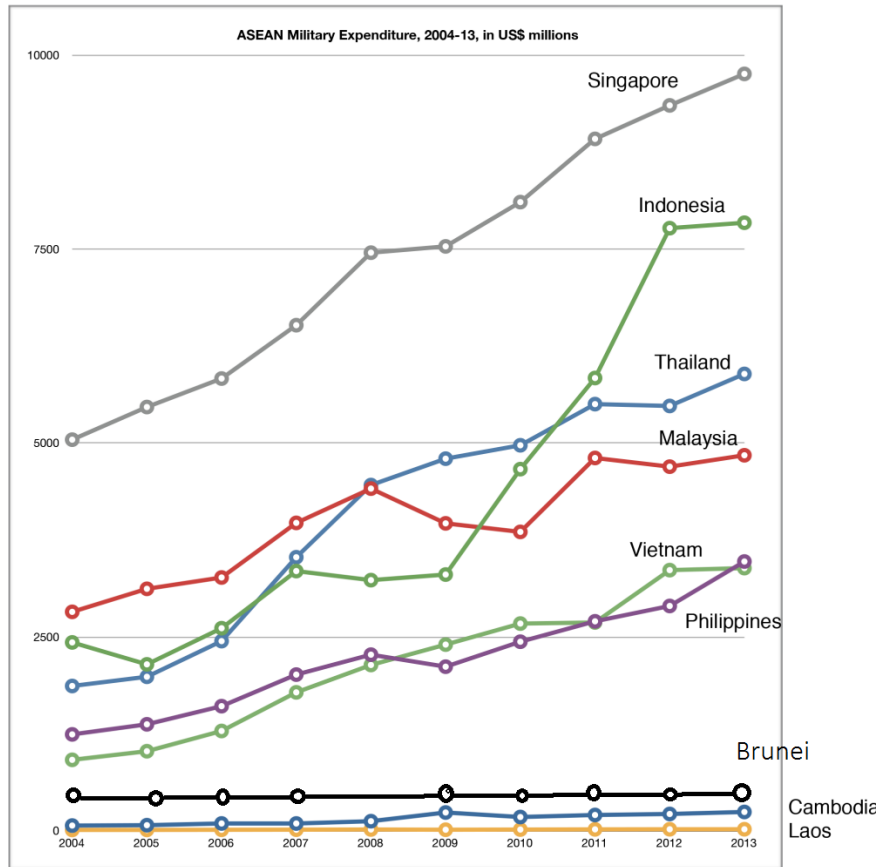
¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Anh Son, (2015), *Vietnamese Ambassador Says Russia to Remain Top Arms Seller*, <http://www.thanhniennews.com/politics/Viet-Names-ambassador-says-russia-to-remain-top-arms-seller-36672.html> diakses tanggal 22 Agustus 2015

Pengeluaran Pertahanan di seluruh wilayah Asia Tenggara meningkat 13,5 persen dari tahun lalu menjadi US\$ 25,4 miliar dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi US\$ 40 miliar pada tahun 2016. Secara umum belanja militer Asia Tenggara selama 10 tahun terakhir dapat terlihat dari grafik berikut.

Grafik 4.1 ASEAN Military Expenditure



Sumber: Military Expenditure Data 2014,
diakses dari <http://milexdata.sipri.org> pada 12 Agustus 2015

Terdapat alasan tersendiri mengenai pembangunan kekuatan masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara menurut kepentingan negara yang bersangkutan. Bagi Singapura yang mempunyai wilayah dan populasi yang relatif kecil, pembangunan kekuatan dilakukan untuk penangkalan sebagai alat pertahanan nasional. Bagi Indonesia peningkatan anggaran ini berhubungan dengan penjagaan terhadap luas wilayah maritimnya yang berkali lipat dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Modernisasi ini dilakukan dalam tiga tahapan, Renstra I (2010-2014), Renstra II (2015-2019) dan Renstra III (2020-

2024). Diharapkan sebelum tahun 2024 Indonesia sudah dapat mencapai MEF (*Minimum Essential Force*) nya.¹¹⁵

Walaupun ini tidak diindikasikan sebagai perlombaan senjata (jika merujuk pada Collin S. Gray¹¹⁶), namun pembangunan kekuatan merupakan hal yang nyata di kawasan ini. Modernisasi kekuatan regional tidak diragukan lagi akan menambah intensitas ketegangan konflik aktual karena masing-masing negara memproyeksikan kekuatannya sehingga penggunaan kekerasan sebagai resolusi sangat mungkin terjadi. Secara umum pembangunan kekuatan Asia Tenggara ditujukan lebih kepada faktor domestik, seperti keamanan nasional dan integritas teritorial.¹¹⁷ Namun, modernisasi militer dapat menyebabkan ketidakstabilan, terutama mengingat adanya ketegangan antar negara-negara di kawasan ini. Pembangunan kekuatan tentu saja menjadi hal yang sensitif sebab dapat menyebabkan *security dilemma* bagi negara lain. Bisa terjadi salah kalkulasi (*miscalculation*), salah menilai (*misjudgment*) dan saling mencurigai (*mistrust*), terutama karena konflik Laut Cina Selatan belum dapat diselesaikan. Dalam upaya menghindari destabilisasi perlombaan senjata akibat modernisasi militer yang dilakukan sebagian besar negara-negara Asia Tenggara, dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat meningkatkan transparansi strategis antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara sehingga dapat mengurangi intensitas kecurigaan intra kawasan. Terdapat kebutuhan yang cukup mendesak mengenai mekanisme tersebut karena perkembangan militer secara agresif naik secara signifikan tiap tahunnya.

Dapat dikatakan, peningkatan kekuatan militer yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara sejalan dengan peningkatan yang signifikan terhadap anggaran militer negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik Seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Menurut *China White Defence Paper* 2010, dalam mengaplikasikan kebijakan nasionalnya di bidang pertahanan, Tiongkok bersikap

¹¹⁵ Goldy Evi Grace Simatupang, (2013), *Modernisasi Militer Asia Tenggara: Destabilisasi Keamanan Regional?*, diakses dari <http://www.fkpmaritim.org/modernisasi-militer-asia-tenggara-destabilisasi-keamanan-regional/> pada 10 Agustus 2015.

¹¹⁶ Menurut Colin. S. Gray perlombaan senjata berlaku ketika “...an arm race is occurring when you have two or more parties perceiving themselves to be in an adversary relationship, who are increasing or improving their armaments at a rapid rate and restructuring their perspective military postures with a general attention to the past, current and anticipated military and political behavior of the other parties.”

¹¹⁷ Simatupang, *loc. cit.*

defensive in nature. Tiongkok menempatkan perlindungan terhadap kedaulatan nasional, keamanan, integritas teritorial, dan pengamanan kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan rakyatnya di atas segalanya. Hal ini menunjukkan prioritas kebijakan keamanan Tiongkok yang mencakup hal-hal vital tersebut.¹¹⁸ Namun pada perkembangannya, Tiongkok saat ini mendominasi belanja militer Asia dan telah menjadi kekuatan militer utama di kawasan dalam hal *power projections* dan juga jumlah pasukan.

Usaha penilaian anggaran pertahanan dan modernisasi Tiongkok menunjukkan bahwa pihaknya berencana untuk meningkatkan tidak hanya hampir setiap aspek yang relevan dari kapabilitas perang konvensional dan asimetris, tetapi juga di setiap aspek dari *sea-air-missile-nuclear capabilities* yang mempengaruhi *power projections* AS dan berpotensi untuk mendukung semua bentuk aksi potensial AS di Asia Pasifik.¹¹⁹ Kritik tentang pengeluaran militer Tiongkok oleh negara-negara di kawasan adalah mengenai kurang transparannya Tiongkok yang sering tidak membahas tentang konteks strategis di mana modernisasi militer Tiongkok dan pertumbuhannya sedang berlangsung. Meskipun belanja militer Tiongkok masih belum jelas, Tiongkok telah memberikan penjelasan yang rinci tentang perumusan dan pengendalian pengeluaran militer pada *defense white paper* 2010.¹²⁰ Perlu ditegaskan kembali, pemerintah Tiongkok tidak mempublikasikan secara rinci pengalokasian anggaran belanja di setiap *platform* militer yang dimilikinya. Tiongkok hanya mempublikasikan jumlah keseluruhan dari anggaran belanjanya militernya. Berikut kutipan dari *defense white paper* Tiongkok tahun 2010 terkait belanja militer Tiongkok¹²¹:

“ . . . Tiongkok menganut prinsip pembangunan pertahanan dan ekonomi nasional yang terkoordinasi. Sejalan dengan tuntutan pertahanan nasional dan pembangunan ekonomi, Tiongkok memutuskan pada ukuran pengeluaran dana pertahanan sesuai dengan cara yang tepat, dan mengelola serta menggunakan dana pertahanan sesuai hukum. Dengan perkembangan ekonomi

¹¹⁸ China's Defence White Paper 2010, diakses dari http://eng.chinamil.com.cn/special-reports/node_47506.htm, pada tanggal 10 Agustus 2015.

¹¹⁹ Asia Pacific (China: Assertiveness Raises Regional Concern), (2011), *Strategic Survey*, 111(1): 352.

¹²⁰ Anthony Cordesman, (2013), *Chinese Military Modernization and Force Development A Western Perspectives*, London: Routledge, hal. 23.

¹²¹ *Ibid.*

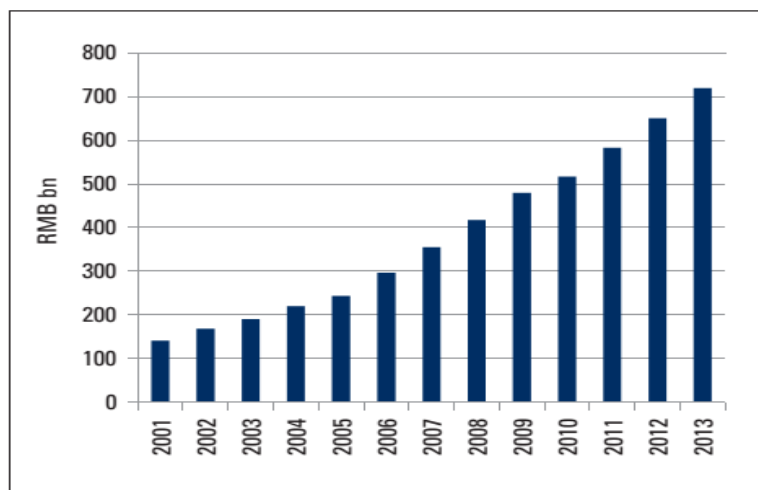
nasional dan sosial, peningkatan pengeluaran pertahanan Tiongkok telah disimpan pada tingkat yang wajar dan tepat. GDP Tiongkok yang sebesar RMB¹²² 31.404,5 miliar pada tahun 2008 dan RMB 34.090,3 miliar pada tahun 2009. Pengeluaran keuangan negara sebesar RMB 6.259,266 miliar pada tahun 2008 dan RMB 7.629,993 miliar pada 2009, naik 25,7 % dan 21,9 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja pertahanan Tiongkok adalah RMB 417,819 miliar pada tahun 2008 dan RMB 495,11 miliar, naik sekitar 17,5 % dan 18,5 % dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pangsa pengeluaran pertahanan tahunan Tiongkok dalam PDB tetap relatif stabil, sedangkan pengeluaran keuangan secara keseluruhan negara cukup menurun. . .“

Walaupun Tiongkok kerap mengulang statementnya bahwa karakteristik pengembangan militernya bersifat defensif, di lain pihak, *security dilemma* terjadi ketika Tiongkok mengembangkan dan memodernisasikan kapabilitas militernya khususnya pada angkatan laut. Modernisasi angkatan laut Tiongkok ini lebih lanjut dikenal dengan dengan kebijakan “*blue water navy*”. Perkembangan militer Tiongkok ini dianggap sebagai strategi ofensif terhadap negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, sehingga hal ini menimbulkan ketegangan kembali di kawasan tersebut.¹²³ Dibutuhkan suatu mekanisme regional dimana Tiongkok dapat menjelaskan bahwa kecurigaan tersebut tidak terbukti. Namun, dengan agresifnya kenaikan anggaran Tiongkok untuk pengeluaran alat-alat kemiliteran dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 (lihat grafik 4.2), *security dilemma* akan sulit dihilangkan.

¹²² RMB = Renminbi, mata uang Tiongkok. Juga dikenal dengan Yuan.

¹²³ Adam Liff P, G. John Ikenberry, (2014), "Racing toward Tragedy?: China's Rise, Military Competition in the Asia Pacific, and the Security Dilemma", *International Security*, 39(2): 72.

Grafik 4.2 Official PLA Budget 2001–13 (RMB bn)



Sumber: *The Military Balance*, (2014), Chapter Six: Asia

Laporan tahunan *DoD* AS pada Mei 2013 menyebutkan bahwa Tiongkok pada 5 Maret 2013 mengumumkan kenaikan 10,7 % anggaran militer tahunannya menjadi \$ 114 miliar, terus meningkat dari dua dekade belakangan ini.¹²⁴ Peningkatan ini terus berkelanjutan secara bertahap. Analisis data dari tahun 2003-2012 menunjukkan anggaran militer Tiongkok secara resmi tumbuh rata-rata 9,7 % per tahun yang telah disesuaikan dengan inflasi selama periode tersebut. Tiongkok memiliki kekuatan fiskal dan kemauan politik untuk mendukung pertumbuhan anggaran pertahanan pada tingkat yang sebanding, meskipun menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 menjadi 7,5 % dari 8 % di tahun 2011.¹²⁵

Peningkatan yang terus berlanjut ini akan mendukung upaya modernisasi militer Tiongkok dan memfasilitasi langkah Tiongkok menuju kekuatan yang lebih profesional. Dengan menggunakan harga dan nilai tukar 2012, *DoD* mengestimasi total pengeluaran militer Tiongkok berada pada kisaran \$ 135 miliar dan \$ 215 miliar.¹²⁶ Namun, sekali lagi, sulit untuk memperkirakan

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Anthony H. Cordesman, Nicholas S Yarosh, (2012), *Chinese Military Modernization and Force Development: a Western Perspective*, Washington D.C.: Center for Strategic & International Studies, hal. 33.

¹²⁶ Department of Defense, (2012), Report to Congress on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2012, Washington D.C.: Office of the Secretary of Defense, Mei 2012, hal. 3 diakses melalui http://www.defense.gov/pubs/pdfs/2012_CMPR_Final.pdf pada 10 Agustus 2015.

pengeluaran militer Tiongkok yang sebenarnya karena kurangnya transparansi dan efek dari sistem ekonomi komando yang dianut Tiongkok. Tiongkok kemudian menyadari bahwa *security dilemma* terhadap perkembangan dan modernisasi militernya akan semakin meningkat jika tidak terdapat suatu mekanisme kelembagaan yang dapat meyakinkan negara-negara besar lainnya terhadap intensi Tiongkok yang sebenarnya bersifat defensif.

4.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia di Laut Cina Selatan

4.2.1 Modalitas Diplomasi Pertahanan Indonesia

Sebagai penguatan dalam diplomasi pertahanan untuk mendukung pemeliharaan stabilitas kawasan, modalitas yang harus dimiliki Indonesia meliputi dua lingkup. *Pertama*, kualitas diplomasi. Kualitas diplomasi merupakan salah satu faktor penting dari *national power* yang dimiliki negara. Kualitas diplomasi dilihat melalui bagaimana negara dapat menggabungkan faktor-faktor yang berlainan menjadi suatu keseluruhan terpadu, memberikan arah dan bobot serta dapat memaksimalkan kapabilitas yang dimiliki.¹²⁷ Selain itu, diplomasi dapat dikatakan berkualitas apabila suatu negara dapat berperan dan memiliki inisiatif di dalam forum internasional terkait penyelesaian masalah. Asumsinya, semakin berkualitas diplomasi yang dimiliki, semakin besar pula kesempatan yang dimiliki negara untuk mencapai tujuannya.

Disamping itu, faktor penting terkait dengan diplomasi adalah dukungan. Adapun dukungan tidak hanya dari domestik (legislatif dan publik), melainkan juga dukungan dari negara lain. Idealnya kebijakan luar negeri tidak hanya ditempuh melalui “senjata tradisional” yaitu diplomasi dan militer, tetapi juga menggunakan “senjata lain” yaitu propaganda.¹²⁸ Karena, perebutan *power* di lingkungan internasional tidak hanya perebutan keunggulan militer dan dominasi politik, melainkan juga perebutan pemikiran manusia. Jadi, *power* negara tidak hanya tergantung pada keterampilan diplomasi dan kekuatan angkatan bersenjata, tetapi juga bagaimana suatu negara bisa mendapatkan dukungan dari publik dan negara lain terhadap kebijakan yang dibuat.

¹²⁷ Hans J. Morgenthau, (2010), *Politik Antar Bangsa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 169.

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 180.

Kapabilitas militer merupakan instrumen penting untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu negara.¹²⁹ Adapun penilaian dari kapabilitas militer dapat dilihat melalui beberapa hal. *Pertama*, teknologi militer. Nasib negara dan peradaban sering ditentukan oleh perbedaan teknologi militer yang dimiliki. Negara yang memiliki teknologi militer lebih canggih, mempunyai posisi yang lebih menguntungkan di dalam lingkungan internasional. Morgenthau membagi 4 hal penilaian terhadap teknologi militer suatu negara¹³⁰: 1) angkatan laut, 2) angkatan darat, 3) angkatan udara, dan 4) kemampuan kordinasi strategis dan taktis dari tiga matra bersenjata. Selain itu, teknologi militer sebagai pendorong kapabilitas militer suatu negara harus memperhatikan juga industri militer dan inovasi teknologi senjata.

Selain teknologi, kualitas kepemimpinan militer mempunyai pengaruh terhadap kekuatan militer suatu negara. Kualitas pemimpin dapat dilihat melalui bagaimana ia dapat menggunakan dan menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam siasat dan taktik perang.¹³¹ Berbeda dengan penilaian atas teknologi militer yang sifatnya material, kepemimpinan militer bersifat imaterial sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran. Patut ditekankan bahwa kekuatan militer suatu negara tidak hanya dapat diukur berdasarkan pada jumlah dari batalion, kapal tempur, dan skuadron yang dimiliki, tetapi juga terdapat faktor lain yaitu pemimpin militer.¹³² Terkadang keunggulan senjata dan kuantitas pasukan bukan merupakan faktor yang paling berpengaruh untuk negara memenangkan perang. Justru kecerdasan pemimpin militer menjadi pengaruh signifikan suatu negara dalam memenangkan perang, meskipun teknologi senjata dan kuantitas pasukan yang dimiliki lebih rendah.

Kekuatan di bidang militer bergantung pada kualitas sumber daya manusia, senjata, belanja militer, serta pengelolaannya di antara berbagai cabang pranata/matra militer.¹³³ Negara yang memiliki teknologi perang yang canggih dan pemimpin militernya memiliki keunggulan siasat dan taktik perang,

¹²⁹ Juanita elias & Peter Sutch, (2007), *The Basics International Relations*, New York: Routledge: hal. 109.

¹³⁰ Hans J. Morgenthau, *Op. Cit.* hal. 148.

¹³¹ *Ibid.*, hal. 150.

¹³² Trevor C. Salmon, Imber & Mark F, (2008), *Issues in International: 2nd Edition*, Oxon: Routledge, hal. 64.

¹³³ Hans J. Morgenthau, *Op. Cit.* hal 151.

cenderung memiliki keunggulan dibanding negara yang tidak memiliki dua kategori tersebut. Namun, menjadi percuma apabila pemerintah tidak dapat mengatur pranata militernya. Pengaturan pranata militer idealnya diatur pemerintah melalui pembagian komponen-komponennya – yang mana tidak terlalu besar maupun kecil, sehingga tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal.

4.2.2 Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Forum Regional terkait LCS

Modalitas yang dimiliki Indonesia dalam penguatan diplomasi pertahanan dalam rangka mendukung pemeliharaan stabilitas kawasan terlihat dari kualitas diplomasi yang dimilikinya. Kualitas diplomasi yang dimiliki Indonesia terlihat dari peran aktif dan inisiatif yang diberikan Indonesia dalam forum diplomasi *first track* dan *second track*. Adapun forum tersebut meliputi ASEAN, ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM), East Asia Summit (EAS) dan ASEAN Maritime Forum. Selain itu, peran aktif Indonesia juga terlihat dari inisiatifnya dalam mendorong terbentuknya mekanisme dalam mengelola konflik di Laut Cina Selatan melalui implementasi DOC dan proses pembentukan COC.

Perkembangan dari draft COC berlanjut melalui pertemuan *intra-ASEAN* dalam *Working Group* tahun 2012 dimana menghasilkan draft dari prinsip COC. Namun isu ini ditolak untuk dibahas oleh Kamboja. Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan, “*I think it is utterly irresponsible if we cannot come up with a common statement on the South China Sea.*”¹³⁴ Marty kemudian menyelesaikan permasalahan *disunity* dengan melakukan kunjungan bilateral (dikenal dengan istilah *shuttle diplomacy*) ke Kamboja, Viet Nam, dan Filipina untuk menyatukan posisi negara anggota ASEAN terkait Laut Cina Selatan. Selanjutnya Indonesia membuat ‘*six-point plan*’ yang dipublikasikan pada Juli 2012.

¹³⁴ *Agence France Presse*, (12 Juli 2012), “ASEAN Struggles for Unity over South China Sea,” dalam Gary Collinson & Christopher B. Roberts, (2013), *The Role of ASEAN*, Acton: Australian National University, hal. 38

Indonesia dan Filipina bertemu dan sepakat pada proposal *six-point* lalu mengajukannya ke anggota negara ASEAN. Setelah itu, Indonesia menginformasikan proposal tersebut kepada Kamboja yang ketika itu menjabat sebagai Ketua ASEAN. Selanjutnya, Kamboja menerbitkan *ASEAN's Six-Point Principles on the South China Sea*. Adapun isi dari poin tersebut meliputi: 1) implementasi DOC, 2) pedoman implementasi DOC, 3) konklusi COC di Laut Cina Selatan, 4) penghormatan terhadap prinsip UNCLOS 1982, 5) *self-restraint* dan *non-use of force*, dan 6) resolusi damai terhadap sengketa berdasarkan prinsip UNCLOS. Terdapat dua *output* dari hasil pertemuan tersebut, yaitu 1) Semua negara anggota ASEAN menyetujui prinsip *ASEAN Common Position* dalam Laut Cina Selatan, terkait komitmen terhadap DOC dan 2) Tiongkok bersedia untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk mengimplementasikan DOC dan “atas dasar konsensus” mewujudkan COC. Dapat dikatakan bahwa diplomasi Indonesia berperan dalam menyatukan anggota ASEAN.¹³⁵

Kualitas dari diplomasi yang dimiliki Indonesia juga terlihat dalam inisiatifnya pada pertemuan AMM ke-45. Indonesia yang diwakili Menlu Marty menyatakan, “*Indonesia will circulate a non paper [on] possible and additional elements of [the] COC. It is meant to be more prescriptive and operational.*”¹³⁶ Indonesia juga menerbitkan “*non-paper*” kepada menteri luar negeri negara anggota ASEAN dalam pertemuan di New York. Proposal yang dikeluarkan Indonesia berjudul, “*Zero Draft A Regional Code of Conduct in the South China Sea.*”¹³⁷ Dokumen ini berdasarkan dari 3 sumber: DOC tahun 2002, Proposal ASEAN dalam *Code of Conduct*, dan Prinsip Enam-Poin ASEAN dalam Laut Cina Selatan. Kontribusi Indonesia yang paling signifikan dalam dokumen ini ada pada Pasal 6 terkait implementasi COC.¹³⁸

Pasal 6 menjelaskan tentang aturan, norma, dan prosedur terkait CBM. Selain itu, terdapat juga isi mengenai pencegahan kecelakaan dan tabrakan di laut yang diambil dari *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea* (COLREGS) tahun 1972. Di Pasal 8, Indonesia memasukkan

¹³⁵ Wang, Vincent Wei-cheng, and Chyungly Lee, (2014), "ASEAN and Recent Tensions in the South China Sea.", *Asian Studies Journal*, 1(2):135.

¹³⁶ Carlyle A. Thayer, (2010), *The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea*, Vol. 6. hal. 7-8.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

mekanisme sengketa yang terdapat dalam *ASEAN Proposed Elements of a Regional Code of Conduct* dan *ASEAN Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (yang mana Tiongkok juga turut menandatangani).¹³⁹ Indonesia dapat berperan lebih besar dalam mempromosikan dan mendorong terbentuknya COC. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat tidak dapat banyak berperan karena Tiongkok mempersepsikan AS sebagai kompetitor. Dapat dikatakan bahwa peran dan inisiatif diplomasi Indonesia membuat Tiongkok dan Amerika Serikat kini menghadapi ASEAN yang lebih bersatu.

Tahun 2013 dan 2014 menjadi tahun penting dalam perkembangan kerjasama maritim antara ASEAN dan Tiongkok. Hal ini terlihat dari hasil dan potensi yang telah didiskusikan oleh kedua pihak dalam beberapa kesempatan. Pada tahun 2013 Tiongkok sepakat untuk mendiskusikan CoC. Selain itu, dalam *ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration of Conduct in the South China Sea (SOM on DoC) ke-7* dan *ASEAN-China Senior Officials' Consultation (ACSOC) ke-20* di Thailand pada April 2014, kedua pihak menekankan pentingnya mengimplementasikan DoC secara menyeluruh dan efektif.¹⁴⁰ Implementasi bukan hanya mencakup aktivitas pembangunan kepercayaan berbasis proyek, namun juga termasuk pengamalan prinsip dan norma dalam DoC. Disamping itu, kedua pihak juga mendiskusikan potensi penandatanganan *ASEAN-China treaty on good neighbourliness and friendly cooperation*, yang sebagian besarnya menekankan pembangunan pada dimensi ekonomi, meskipun juga termasuk kerjasama maritim.

Disamping diplomasi multilateral dan bilateral, Indonesia juga menginisiasi pada *second track. Workshop* yang diberi nama *Managing Potential Conflicts in the South China Sea* pada tahun 1990.¹⁴¹ Tawaran yang diberikan oleh *workshop* ini adalah bukan membahas tentang penyelesaian sengketa, tetapi merencanakan program kerjasama, mempromosikan dialog dan mengembangkan CBMs.¹⁴² Intinya adalah 'mengelola' dibandingkan 'menyelesaikan' konflik. Pencapaian dari *workshop* yang diinisiasi Indonesia adalah negara-negara

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Gary Collinson & Christopher B. Roberts, *Op. Cit.* hal. 52.

pengklaim maupun bukan pengklaim memahami posisi dari masing-masing negara.

Sejak tahun 1990an, Indonesia sebenarnya telah berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi penyelenggaraan sebuah Lokakarya tentang Laut Cina Selatan untuk mengelola potensi konflik di kawasan tersebut melalui upaya pengembangan *confidence building measures*. Indonesia mendorong diskusi dan dialog di antara negara yang memiliki sengketa wilayah laut, dan menjajaki berbagai kemungkinan dan cara bekerjasama di bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama. Lokakarya diikuti oleh para peserta dari 10 negara di Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Tiongkok, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Viet Nam yang berasal dari berbagai institusi pemerintah. Hingga saat ini, Lokakarya telah menjadi program kegiatan rutin tahunan dari BPPK Kemlu RI. Keberhasilan lokakarya Laut Cina Selatan dalam membawa pihak-pihak yang bersengketa, termasuk Tiongkok pada satu forum untuk membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, telah diakui oleh banyak pihak di luar negeri dan bahkan menjadi rujukan *success story* sebagai model untuk dapat ditiru dalam penyelesaian konflik teritorial di kawasan lainnya di dunia. Oleh sebab itu, lokakarya ini telah menjadi bagian dari diplomasi *second track* Indonesia dalam mengupayakan *Confidence Building Measures* di perairan Laut Cina Selatan melalui kerjasama di berbagai bidang dan isu teknis antara lain penelitian ilmiah kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

Pada peringatan 20 tahun lokakarya Laut Cina Selatan diangkat tema “*From Potential Conflicts to Cooperation*” yang secara tepat merefleksikan pencapaian lokakarya selama kurun waktu tersebut. Indonesia sebagai inisiator menekankan mengenai arti penting pengelolaan Laut China Selatan dari “*Potential Conflicts in Cooperation*” mengingat wilayah ini merupakan salah satu lintas pelayaran yang paling strategis di dunia dan juga meliputi salah satu jalur maritim utama di dunia.

Sebagai pihak yang tidak memiliki klaim di wilayah tersebut, Indonesia berperan penting dalam memfasilitasi pembahasan dan dialog (mediator) secara netral dan tidak memihak di antara pihak-pihak yang memiliki klaim di Laut Cina Selatan. Acara “*A Special Commemorative Events of the 20th Anniversary of the Workshop Managing Potential Conflicts in the South China Sea*” memiliki arti

khusus karena dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa itu, Marty M. Natalegawa menyerahkan sertifikat penghargaan “*A Special Achievement Award*” kepada Prof. DR. Hasyim Djalal atas jasa-jasanya dan upaya-upayanya di bidang diplomasi preventif multilateral terhadap pengelolaan “*Potential Conflicts*” di Laut Cina Selatan, karena selama ini Prof. Dr. Hasyim Djalal adalah motor dari “*Workshop on Managing Potential Conflicts*” di Laut Cina Selatan.

Pada sisi lain, salah satu faktor keberhasilan diplomasi adalah dukungan dari entitas domestik. Opini publik sangat berhubungan dengan dukungan rakyat terhadap suatu kebijakan negara. Sebagaimana dijelaskan Nicolson (1988):

*“The second factor in the development of diplomatic theory during the nineteenth century was the growing realization of the importance of public opinion. “Opinions” he said are stronger than armies.*¹⁴³

Pemerintah Indonesia harus mendapatkan dukungan dari publik sebagai kekuatan dalam membawa misi perdamaian. Permasalahannya adalah diplomasi Indonesia di dalam sengketa Laut Cina Selatan tidak populer di kalangan publik domestik. Bahkan, dari hasil survei yang dilakukan oleh *Centre for Chinese Studies-Indonesia* tahun 2014 dengan 1,096 responden di 15 kota besar di Indonesia, ketika ditanya mengenai isu sengketa di Laut Cina Selatan, hanya 12 persen yang mengetahui isunya.¹⁴⁴ Mayoritas dari populasi di Indonesia (khususnya di kota besar) tidak mengerti permasalahan di Laut Cina Selatan apalagi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam rangka mengurangi tensi konflik yang ada. Dengan fakta ini, diharapkan pemerintah dapat menggelar forum-forum dengan melibatkan publik yang berkaitan dengan konflik Laut Cina Selatan untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan diplomasi pertahanan Republik Indonesia.

4.2.3 Kapabilitas Militer dalam mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia di LCS

Salah satu faktor pendukung dari diplomasi pertahanan Indonesia adalah kualitas

¹⁴³ Sir Harold Nicolson, (1988), *Diplomacy*, Washington: Institute for the Study of Diplomacy. Hal, 12.

¹⁴⁴ Rene L. Pattiradjawane, (2015), *South China Sea Disputes: Sovereignty and Indonesian Foreign Policy*, Singapore: RSIS. Hal, 23.

dan kuantitas dari kapabilitas militer yang dimilikinya. Pada 12 Maret 2014, Indonesia mengumumkan bahwa terdapat *overlap* antara *nine-dash line* Tiongkok dengan Kepulauan Natuna di provinsi Riau.¹⁴⁵ Pengumuman yang belum pernah terjadi sebelumnya itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemungkinan merespon tiap peningkatan Tiongkok di lingkup maritim. Di tahun yang sama, Panglima Tentara Nasional Indonesia Moeldoko menyatakan akan meningkatkan kehadiran militer di provinsi Riau, yang meliputi batalion angkatan darat, pesawat tempur, kapal tempur, dan juga memfokuskan *budget* pertahanan pada matra laut.¹⁴⁶ Namun, kapabilitas yang dimiliki Indonesia pada angkatan laut dan udara untuk mempertahankan wilayahnya, tidak sebanding dengan kapabilitas yang dimiliki oleh Tiongkok.¹⁴⁷ Tantangan lain adalah angkatan laut dan udara Indonesia, selalu memainkan peran sebagai “*second fiddle*”. Salah satu contohnya adalah, dari 400,000 personil aktif di TNI, proporsi dari angkatan laut dan udara hanya sebesar 18,5 persen; yang mana personil marinir berjumlah 20,000.¹⁴⁸

Pada sisi teknologi, terdapat banyak alutsista Indonesia yang membutuhkan modernisasi. Sebagian besar kapal yang dimiliki angkatan laut telah digunakan selama seperempat abad, dan beberapa mengalami kerusakan. Permasalahan yang sama juga dihadapi angkatan udara. Akibat embargo senjata dari Amerika Serikat dari tahun 1999 hingga 2005, menyebabkan pesawat-pesawat yang ada kekurangan suku cadang. Hal ini membuat Indonesia merubah haluan ke Rusia dengan membeli sebanyak 16 Su-27SK/SKM dan Su-30MK/MK2.¹⁴⁹ Pada beberapa tahun belakangan, telah dilakukan modernisasi terhadap kedua matra tersebut. Angkatan laut misalnya, telah memesan 3 kapal selam tipe 209/1400 dari Korea Selatan dan kapal tempur jenis *Sigma-class* dari Belanda. Selain itu, industri pertahanan domestik juga memproduksi dua kapal

¹⁴⁵ Murray Hiebert, Phuong Nguyen, & Gregory B. Poling, (2014), *Perspectives on the South China Sea: Diplomatic, Legal, and Security Dimensions of the Dispute*, Lanham: Rowman & Littlefield, hal. 51.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Pemaparan oleh Edy Prasetyono, pada seminar penelitian 6 Oktober 2015 dengan tema “*Diplomasi Pertahanan Indonesia: Keamanan Kawasan untuk Mendukung Poros Maritim*”, Universitas Budi Luhur. Jakarta.

¹⁴⁸ Felix K. Chang, (2014), *Even Indonesia: Concerns over China’s Reach in the South China Sea*, Philadelphia: FPRI.

¹⁴⁹ *Ibid.*

cepat KCR-40 dan KCR-60.¹⁵⁰

Sementara itu, angkatan udara telah membangun kembali pasukan di garis depan. Pada tahun 2012, Indonesia menerima tawaran 24 pesawat tempur F-16C/D bekas milik Amerika Serikat. Melalui program senilai \$670 miliar, pesawat tersebut diperbaharui dan ditingkatkan sistem radarnya. Pesawat pertama kali tiba pada bulan Juli 2014 di Landasan Udara Roesmin Nurjadin. Selain itu, Indonesia juga berencana melakukan *upgrade* pada 10 F-16 yang dimilikinya. Indonesia juga merencanakan untuk mengganti pesawat F-5E/F yang dimilikinya. Salah satu penggantianinya dengan melakukan kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-X dengan Korea Selatan dan diprediksi untuk digunakan pada tahun 2020.¹⁵¹

Akan tetapi, modernisasi yang dilakukan Indonesia, tetap belum memenuhi *Minimum Essential Force* yang dicanangkan. Pada tahun 2014, Kasal Marsetio menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan puluhan kapal selam untuk melindungi domain maritim.¹⁵² Disamping itu, permasalahan lainnya adalah terdapat beberapa kapal tempur hampir mendekati masa pakai. Di matra udara, tujuan dari Indonesia adalah memiliki 100 pesawat tempur menjadi tantangan tersendiri. Bahkan, pada infrastruktur, belum ada *upgrade* militer di Kepulauan Natuna. Pada matra laut, hanya dibatasi pada kapal kecil sebagai navigasi di ZEE, yang mana di matra udara, tidak ada pesawat tempur secara permanen di Lanud Ranai. Meskipun latihan telah dilakukan sejak 1996, permasalahan utama dalam melakukan *upgrade* di Natuna adalah terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses operasional seperti bahan bakar, suku cadang, dan perbaikan.¹⁵³

4.3 Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa elemen yang merupakan modalitas dari diplomasi pertahanan Indonesia dalam menjaga stabilitas di Laut Cina Selatan. Modalitas tersebut ada pada kualitas beberapa

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Ristian Atriandi Supriyanto, (2015), *Indonesia's Natuna Islands: Next Flashpoint in the South China Sea*, Singapore: RSIS. Hal.12.

aspek, yaitu diplomasi dan militer. Kualitas diplomasi tersebut terlihat dari inisiasi Indonesia pada forum multilateral, bilateral, dan *second track* yang diikuti. Selain itu, kualitas diplomasi Indonesia terlihat dari nilai-nilai moderat dan damai yang menjadi *core value* dalam tiap perundingan, sehingga negara-negara eksternal maupun pengklaim mempercayakan Indonesia sebagai inisiator dan mediator di tiap perundingan yang terkait dengan penyelesaian dan manajerial konflik.

Sementara itu, pada kapabilitas militer, kekuatan dari matra laut ditentukan dari segi kuantitas, kualitas, dan infrastruktur. Elemen diplomasi dan militer harus bersinegi dengan baik. Keberhasilan diplomasi salah satunya dapat didukung oleh kapabilitas militer yang sejalan dengan posisi *bargaining* Indonesia diantara negara-negara pengklaim. Namun kapabilitas militer ini belum mencapai pada tahap yang ideal. Sampai saat ini Indonesia sebagai negara *status quo* tidak memiliki pilihan selain menjaga keamanan nasionalnya melalui kapabilitas militer dan *skill* dari para diplomatnya, sehingga ketika mengatakan *power*, instrumen yang dimiliki negara seperti politik dan militer harus saling melengkapi.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam politik internasional kontemporer, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai geostrategi yang tinggi. Didukung dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk, serta wilayah maritim yang luas, maka Indonesia juga memiliki potensi menjadi kekuatan maritim yang kuat. Oleh karena itu, penancangan Visi Poros Maritim Dunia oleh Pemerintah Indonesia sejak 2014 bukan merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengoptimalkan pembangunan nasional dengan memberdayakan seluruh potensi yang terdapat di Indonesia, serta pada saat yang sama, memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan dan potensi ancaman yang muncul dalam mencapai visi tersebut.

Sengketa di wilayah Laut Cina Selatan merupakan salah satu wujud potensi ancaman bagi Indonesia dalam mencapai visi yang melibatkan unsur kemaritiman ini. Indonesia memang tidak terlibat langsung dalam konflik yang melibatkan lima negara ini. Namun, lokasi geografis yang sangat dekat dengan teritori Indonesia ini perlu mendapat perhatian besar. Malaysia dan Filipina sebagai negara pengklaim merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Brunei Darussalam merupakan negara yang terletak di Borneo, wilayah pulau yang sama dengan beberapa propinsi di bagian utara wilayah Indonesia. Selain itu, Viet Nam dan Tiongkok berada di sisi utara Indonesia dengan dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, ketidakstabilan di kawasan Laut Cina Selatan yang terletak di Asia Timur dapat mempengaruhi upaya Indonesia untuk mempertahankan kestabilan di wilayah yurisdiksinya. Ketidakstabilan tersebut dapat menjadi hambatan dalam menciptakan Indonesia sebagai pusat aktivitas maritim yang aman bagi masyarakat internasional.

Dalam rangka mencapai keamanan maritim di dalam teritori Indonesia dan kawasan, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sebuah diplomasi pertahanan yang dapat membantu menjaga perdamaian di wilayah Laut Cina Selatan. Dalam mengimplementasikan diplomasi pertahanan

yang merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia, diperlukan sebuah terjemahan yang sinergis antara konsep serta operasionalisasi visi poros maritim dunia. Indonesia harus mempunyai strategi diplomasi pertahanan yang matang dan hati-hati karena Indonesia bukan merupakan negara yang terlibat pada sengketa LCS. Strategi yang matang dan kehati-hatian dalam perumusan diplomasi pertahanan akan memberikan solusi yang komprehensif dan efektif bagi sengketa di wilayah perairan tersebut. Oleh karena itu, perumusan diplomasi pertahanan secara seksama harus berlandaskan pemahaman yang baik ke atas konflik di wilayah ini serta ke atas visi poros maritim dunia itu sendiri.

Dalam memahami sengketa di Laut Cina Selatan, maka, Indonesia perlu memahami potensi yang terdapat di wilayah ini. Wilayah yang memiliki keragaman fitur geografis ini merupakan salah satu penyumbang utama produksi perikanan serta mineral di dunia. Wilayah ini bukan saja berisikan pulau tetapi juga karang-karang dan bebatuan. Meskipun sulit mendapatkan pengukuran yang tepat, potensi minyak dan gas bumi di kawasan ini juga melimpah. Lebih lanjut, seperti halnya letak Indonesia yang strategis, Laut Cina Selatan juga merupakan wilayah yang strategis mengingat fungsinya sebagai pusat pertemuan para kapal dari Benua Eropa, Asia, dan Pasifik bagian Barat. Oleh karena itu, kebebasan navigasi di wilayah ini adalah penting bagi banyak negara di dunia, tidak terbatas hanya pada negara-negara pengklaim.

Dengan demikian, eskalasi dan deeskalasi ketegangan yang sudah menurun kepada tahap konfrontasi kecil di wilayah ini merupakan hal yang signifikan. Signifikansi dinamika konflik semakin meningkat mengingat dasar-dasar klaim yang berbeda di antara negara pengklaim. Visi poros maritim dunia Indonesia kemudian perlu meletakkan variabel-variabel di atas dalam perumusan strategi pewujudan visi, terutama dalam diplomasi pertahanannya kepada negara-negara pengklaim serta pada tingkat regional, agar dapat mencakup pencapaian tujuan nasional pada dimensi kedaulatan, keamanan dan ekonomi.

Pemahaman ke atas visi poros maritim dunia juga harus dilakukan secara seksama. Visi yang tidak baru ini pada dasarnya berlandaskan pada potensi-potensi yang telah diketahui oleh para pemimpin Indonesia di masa lalu. Pencapaian visi Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dapat memanfaatkan letak Indonesia yang strategis. Selain itu, Indonesia juga perlu memberdayakan

sumber-sumber daya alam, manusia serta infrastruktur dalam menciptakan sebuah wilayah yang dapat menjadi tempat bagi masyarakat internasional untuk berlabuh dan melakukan aktivitas kemaritimannya yang lain secara aman. Tentu saja visi poros maritim dunia juga perlu diwujudkan dengan mempertimbangan unsur keberlanjutan, sehingga pewujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia di masa mendatang akan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi penduduknya untuk waktu yang lama.

Diplomasi pertahanan yang ideal kemudian perlu mempertimbangkan beberapa variabel internal dan eksternal lainnya. Hal yang paling utama adalah dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang dapat menjadi bagian strategi dalam diplomasi pertahanan. Ketika meletakkan dinamika sengketa Laut Cina Selatan dan upaya mencapai visi poros maritim dunia sebagai variabel utama dalam perumusan, pengembangan modalitas seperti kuantitas dan kualitas diplomasi serta postur pertahanan perlu untuk tetap dilakukan. Indonesia bukan saja perlu mempertimbangkan pencapaian kemandirian dalam industri pertahanan, tetapi juga pengembangan kerjasama pertahanan dengan negara-negara kawasan.

Indonesia juga perlu menjaga keseimbangan dalam hubungan luar negerinya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai dua negara besar di kawasan Asia Pasifik. Indonesia juga perlu memanfaatkan berbagai dinamika dalam forum atau mekanisme regional yang telah ada dalam membantu menciptakan kestabilan di wilayah Laut Cina Selatan. Sentralitas ASEAN dalam ARF, ADMM, EAS dan ASEAN Maritime Forum yang cenderung fokus kepada isu-isu non-tradisional harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Pemberdayaan tersebut dapat berupa peningkatan *soft power* Indonesia seperti hubungannya dengan peningkatan kapasitas negara termasuk militer dalam rangka menciptakan kemampuan HADR yang matang. Lebih lanjut, pemberdayaan juga dapat melibatkan berbagai unsur dalam diplomasinya terutama *track II* dimana komunitas profesional di Indonesia dapat membantu mencapai visi poros maritim dunia pada saat yang sama membantu menciptakan kestabilan di wilayah Laut Cina Selatan.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi ini disusun berdasarkan pertimbangan *cost and benefit* mengenai keterlibatan Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Indonesia mempunyai kepentingan terhadap penanganan konflik di Laut Cina Selatan, sebab konflik itu bila tidak dapat ditangani dengan baik akan berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia dan kawasan. Dalam rangka mewujudkan visi poros maritim dunia, Indonesia harus mampu mempertahankan strategi *hedging*, posisi Indonesia sebagai anggota yang aktif dalam menginisiasi pengelolaan konflik pada forum-forum multilateral dan regional berdasarkan prinsip CBM. Disamping itu, berdasarkan dimensi kedaulatan Indonesia tetap perlu menegaskan klaimnya terhadap ZEE Indonesia di perairan tersebut yang terletak di utara Kepulauan Natuna. Hal ini tentunya harus didukung oleh pengembangan modalitas militer terutama matra laut dan udara Indonesia.

Konflik di Laut Cina Selatan apabila bereskalasi yang berdampak pada terancamnya stabilitas kawasan akan memberikan implikasi politik yang signifikan terhadap Indonesia. Implikasi tersebut pada satu sisi adalah Indonesia akan berada di antara benturan kepentingan kekuatan besar di kawasan, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada sisi lain, kepentingan nasional Indonesia di Laut Cina Selatan juga terancam sebab wilayah ZEE Indonesia di perairan itu dipastikan akan terkena *spill over*. Dalam tumpang tindih kepentingan kekuatan besar kawasan, Indonesia nampaknya harus dapat memanfaatkan forum-forum regional seperti ASEAN dan ARF untuk bertahan pada sisi stabilitas kawasan. Selain itu Indonesia harus bersikap *hedging* agar tidak terpengaruh ke dalam polarisasi kedua negara tersebut. Strategi *hedging* dan prinsip CBM merupakan pilihan yang rasional mengingat peningkatan kekuatan militer negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Namun, hendaknya kembali dipahami bahwa upaya ASEAN selama ini untuk mencari solusi damai atas sengketa di Laut Cina Selatan sesungguhnya merupakan pendekatan informal melalui *track II diplomacy*, sebab Tiongkok menolak penggunaan pendekatan formal berlatar multilateral. Oleh karena itu, sifat-sifat pendekatan yang kooperatif melalui jalur diplomasi harus tetap digunakan. Sifat ASEAN yang *loose* dapat membuat

Tiongkok dan Amerika Serikat merasa nyaman dan pada akhirnya akan membuka diri terhadap penyelesaian yang kooperatif.

Pada upaya pencapaian misi melalui diplomasi pertahanan, diperlukan dukungan dari seluruh elemen yang terkait dengan isu ini. Antara lain, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kementerian Luar Negeri dapat berupaya dalam pemenuhan modalitas yang dibutuhkan dalam berdiplomasi dan menentukan proyeksi strategi politis Indonesia, sedangkan Kementerian Pertahanan dapat berupaya dalam mendukung Kementerian Luar Negeri pada pemenuhan modalitas di bidang pertahanan, Kemhan harus mempunyai strategi dalam memperkuat postur pertahanan melalui pemenuhan sumberdaya militer. Indonesia wajib pula mengamankan kepentingan nasionalnya di Laut Cina Selatan dari *spill over* konflik yang berkembang, sebab hal itu merupakan amanat konstitusi. Untuk bisa menangani *spill over* tersebut, Indonesia membutuhkan modalitas politik yang besar, selain tentunya kekuatan Angkatan Laut yang memadai. Namun memperhatikan kondisi saat ini, belum jelas apa yang bisa dijadikan sebagai modalitas politik Indonesia untuk mengantisipasi implikasi dinamika di Laut Cina Selatan.

Dalam hal diplomasi pertahanan, Indonesia harus mengembangkan strategi *multitrack diplomacy*. Selain diplomasi *track I*, pengembangan diplomasi pertahanan melalui *track II* juga sangat diperlukan dalam bentuk pelaksanaan diplomasi dengan melibatkan lembaga non-pemerintah atau profesional. Dalam pelaksanaannya, diplomasi pertahanan melalui *track II* membahas mengenai cara dalam pembuatan perdamaian yang dilakukan dengan adanya resolusi dari kelompok profesional dalam mengelola konflik. Diplomasi *track II* ini akan mendukung pemerintah dalam menyiapkan rekomendasi terhadap posisi Indonesia di Laut Cina Selatan.

Pada sisi lain, salah satu faktor keberhasilan diplomasi pertahanan Indonesia adalah dukungan dari entitas domestik. Opini publik sangat berhubungan dengan dukungan rakyat terhadap suatu kebijakan negara. Pemerintah Indonesia harus mendapatkan dukungan dari publik sebagai kekuatan dalam membawa misi perdamaian. Kementerian Luar Negeri terutama Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri untuk menggelar forum-forum dengan melibatkan publik dengan tema mengenai konflik

Laut Cina Selatan untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan diplomasi pertahanan Republik Indonesia.

Selain pertahanan Indonesia harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya Implikasi ekonomi yang secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Implikasi ekonomi tersebut adalah terancamnya pendapatan negara dari ladang gas bumi pada ZEE Indonesia di perairan tersebut. Selama ini ladang gas bumi di wilayah ZEE Indonesia memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara, karena sebagian besar hasilnya langsung dialirkan lewat pipa bawah laut ke Singapura dan sebagian kecil ke Malaysia. Terdapat pula implikasi ekonomi secara tidak langsung yang berupa meningkatnya biaya pengapalan komoditas ekspor Indonesia ke kawasan Asia Timur. Apabila eskalasi konflik di Laut Cina Selatan meningkat, dipastikan biaya asuransi kapal niaga yang melintasi perairan itu juga akan meroket. Terbuka pula kemungkinan kapal niaga yang berlayar ke Asia Timur harus mengubah rutenya melalui Selat Makasar dan terus ke pantai timur Filipina untuk kemudian mengarah ke Asia Timur. Padahal nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Timur cukup signifikan pula dalam menunjang roda ekonomi nasional.

Kekuatan pertahanan Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut harus mampu mengamankan kepentingan nasional Indonesia apabila pecah konflik di Laut Cina Selatan, baik meminimalisasi *spill over* yang muncul maupun mengamankan berbagai ladang gas yang ada di ZEE Indonesia. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan suatu postur kekuatan yang mampu beroperasi (secara gabungan) di Laut Natuna dan sekitarnya. Titik kritisnya adalah apakah skenario konflik di Laut Cina Selatan sudah diwadahi dalam kemampuan yang dibangun dalam *minimum essential force* (MEF). Oleh karena itu, dalam perkembangannya sebaiknya Laut Cina Selatan ditetapkan sebagai salah satu *flash point* bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Accenture. (2012). *Optimizing Transformation in Defense*. New York: Defense Business Service.
- ADMM. (2015, 14 Januari). "About the ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)," <https://admm.asean.org/index.php/about-admm/2013-01-22-10-51-17.html> diakses kembali pada 20 Agustus 2015.
- ADMM. (2009). *Annex F: ASEAN Defence Establishment and Civil Society Organisation (CSOs) Cooperation on Non-Traditional Security*. Concept Paper.
- ADMM. (2014, 24 Desember). "Past Meeting and Events (2006-2014)." diakses kembali pada 20 Agustus 2015.
- ADMM. (2015, 14 Januari). "About the ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM-Plus)." <https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm-plus.html> diakses kembali pada 23 Agustus 2015.
- ADMM. (2014, 20 Mei). *Concept Paper on Establishing a Direct Communication Link in the ADMM Process*.
- ADMM. (2013, 7 Mei). *Concept Paper on Establishing ASEAN Defence Interaction Programmes*.
- Agence France Presse. (12 Juli 2012). "ASEAN Struggles for Unity over South China Sea." dalam Gary Collinson dan Christopher B. Roberts. (2013). *The Role of ASEAN*. Acton: Australian National University.
- Andrea, F. "Peran Keamanan ASEAN Regional Forum." dalam Bantarto Bandoro (ed.). (1996). *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Antara. "Indonesia Dorong Kerjasama Maritim di ASEAN." diakses melalui <http://www.antaraneews.com/berita/476879/indonesia-dorong-kerja-sama-maritim-di-asean> pada 20 Agustus 2015.
- ASEAN. (2002). *2002 Declaration on The Conduct of Parties In The South China Sea*.
<http://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2002%20Declaration%20on%20the%20Conduct%20of%20Parties%20in%20the%20South%20China%20Sea-pdf.pdf>
diunduh pada 25 Agustus 2015.
- ASEAN. (2011). "ASEAN Regional Forum Security Outlook Volume XII." *ASEAN Regional Forum Document Series*.
- Atriandi Supriyanto, Ristian. (2012). *Indonesia's South China Sea Dilemma: Between Neutrality and Self Interest*.

- Aulia, Hanna. (2015). “*Profil Negara-negara ASEAN*”, http://www.academia.edu/9374844/PROFIL_NEGARA-NEGARA_ASEAN_1_BRUNEI_DARUSSALAM diakses pada 24 Agustus 2015.
- Bateman, Sam dan Ralf Emmers. (2008). *Security and International Politics in the South China Sea: Towards a Co-operative Management Regime*. London: Routledge.
- Bernamea, (2015, 15 Agustus), “*M’sia lodges diplomatic protest against Beting Patinggi Ali intrusion*,” <http://www.nst.com.my/node/96317> diakses pada 26 Agustus 2016.
- Bower, Ernest Z., Lie Nathanael Santoso. “18th ASEAN Regional Forum.” diakses dari <http://csis.org/publication/18th-asean-regional-forum-bali-indonesia> pada tanggal 15 November 2013.
- Buszynski, Leszek dan Christopher B. Roberts. (2014). *The South China Sea Maritime Dispute: Political, Legal and Regional Perspectives*. New York: Routledge.
- Chang, Felix K. (2014). *Even Indonesia: Concerns over China’s Reach in the South China Sea*. Philadelphia: FPRI.
- Centre Thucydide. (2003, 1 Januari). “AFRI 2002, Volume III – The “Defence Diplomacy: Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence.” <http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr> diakses 5 September 2014.
- Chun, Wu Si. (2009). *Origin and development of Spratly Disputes*. Beijing: China Economic Public House dalam catatan kaki pada International Crisis Group. (2012, 23 April). “Stirring up the South China Sea (I).” *Crisis Group Asia Report* No. 223. Beijing/Brussel: ICG.
- Cordesman, Anthony H. dan Nicholas S Yarosh. (2012). *Chinese Military Modernization and Force Development: a Western Perspective*. Washington D.C.: Center for Strategic & International Studies.
- Cordesman, Anthony. (2013). *Chinese Military Modernization and Force Development A Western Perspectives*. London: Routledge.
- Council on Foreign Relation. (Januari 2013). “South China Sea Tentions.” <http://www.cfr.org/china/southchina-sea-tensions/p297900> diakses pada 24 Februari 2015.
- Detik.com*. “Dialog Kebijakan Indonesia, Buka Peluang Kerjasama Maritim dengan Rusia.” diakses melalui <http://news.detik.com/read/2015/05/16/033147/2916205/10/dialog-kebijakan-indonesia-buka-peluang-kerja-sama-maritim-dengan-rusia> pada 19 Agustus 2015.
- Dewan Maritim Indonesia. (2005). Draft Kebijakan Kelautan Indonesia.

- Dimiyati, Muh. (2014, 10 Desember). *Kontribusi Strategis IPTEK untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Kemenristek RI.
- East Sea Studies. (2012, 28 Mei). "A legal analysis in support of Viet Nam's position regarding the Paracel & Spratly Islands." <http://nghiencuubiendong.vn/en/publications/Viet-Name-se-publications/698-a-legal-analysis-in-support-of-viet-nams-position-regarding-the-paracel-a-spratly-islands> diakses pada 25 Agustus 2015.
- EENI. (2015). "Cina (Tiongkok): geografi, penduduk, bahasa, agama, peradaban." <http://id.reingex.com/China-Population-Languages-Religion.shtml> diakses pada 24 Agustus 2015.
- Elias, Juanita dan Peter Sutch. (2007). *The Basics International Relations*. New York: Routledge.
- Fravel, T. (2012). "South China Sea: What Issue and Whose Core Interest." *6th Berlin Conference on Asia Security*. Berlin: Konrad Adenauer Stiftung.
- Gao, Z. & Bing Bing Jia. (2013). "The nine-dash line in the South China Sea: history, status, and implications." *American Journal of International Law*, 107(1).
- Global Security. "Military Clashes in the South China Sea." <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-clash.htm> diakses pada 25 Agustus 2015.
- Goh, Evelyn. (2006). *Understanding "hedging" in Asia-Pacific Security*, Working paper yang diajukan pada Pacific Forum CSIS, Honolulu, Hawaii pada tanggal 31 Agustus.
- Guoqiang, Li. (2015, 11 Mei), "China Sea Oil and Gas Resources," http://www.ciis.org.cn/english/2015-05/11/content_7894391.htm diakses pada 25 Agustus 2015.
- He, Kai. (2008). *Institutional Balancing in the Asia Pacific: Economic Interdependence and China's Rise*. New York: Routledge.
- Hiebert, Murray, Phuong Nguyen, & Gregory B. Poling. (2014). *Perspectives on the South China Sea: Diplomatic, Legal, and Security Dimensions of the Dispute*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Hillary, Clinton. (2008). "Security and Opportunity for the Twenty-First Century." *Foreign Affairs* (Januari-Februari).
- IBRU. (2011, 13 Oktober). "China and Viet Nam agree principles for resolving maritime disputes." https://www.dur.ac.uk/ibru/news/boundary_news/?itemno=12969 diakses pada 25 Agustus 2015.
- IISS. (2011). "Asia Pacific (China: Assertiveness Raises Regional Concern)." *Strategic Survey*, 111(1).

- IISS. (2013). *The Military Balance*. London: Routledge.
- Indrawanto, Soni. (2014). *Pendidikan Karakter Maritim Sebagai Upaya Memperkuat Jiwa Kemaritiman Di Tingkat Satuan Pendidikan Yayasan Hang Tuah*.
- Jamandre, Tessa. (2011, 6 Maret). "China fired at Filipino fishermen in Jackson atoll." <http://www.abs-cbnnews.com/-depth/06/02/11/china-fired-filipino-fishermen-jackson-atoll> diakses pada 25 Agustus 2015.
- Jayakumar, S., Tommy Koh, Robert Beckman. (2014). *The South China Sea Dispute and Law of the Sea*. Singapura: NUS Centre for International Law.
- Jia, Bing Bing dan Stefan Talmon. (2014). "Introduction." dalam Bing Bing Jia dan Stefan Talmon (ed.). *The South China Sea Arbitration: A Chinese Perspective*. London/Oxford: Bloomsbury Publishing.
- Jinming, Li dan Li Dexia. (2003). "The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note." *Ocean Development and International Law*: 287-295 dikutip dalam Yann-huei Song dan Keyuan Sou (ed.). (2014). *Major Law and Policy Issues in the South China Sea: European and American Perspectives*. Farnham: Ashgate Publishing.
- Jurnal Maritim*. (2014). "Strategi Maritim Untuk Pertahanan Indonesia." diakses melalui <http://jurnalmaritim.com/2014/11/strategi-maritim-untuk-pertahanan-indonesia> / pada 12 Juni 2015.
- Kaplan, Robert D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of A Stable Pacific*. New York: Random House.
- Kementerian Luar Negeri RI. "Indonesia Buka Peluang Kerja Sama Maritim dan Ekonomi dengan Panama." diakses melalui <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7535&l=id> Pada 20 Agustus 2015.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2015). "Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia." diakses melalui <http://www.Kemlu.Go.Id/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=112&L=Id> pada 19 Agustus 2015.
- Kementerian Pertahanan RI. (2008). *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*. diakses melalui <http://www.kemhan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf> pada 7 Agustus 2015.
- Kementerian Pertahanan RI. "Rapim Kemhan Tahun 2015: Kemandirian Industri Pertahanan, Semangat Bela Negara dan Jiwa Kemaritiman." diakses melalui <http://puskompublik.kemhan.go.id/post-rapim-kemhan-tahun-2015--kemandirian-industri-pertahanan-semangat-bela-negara-dan-jiwa-kemaritiman.html> pada 12 Juni 2015.

- Keyuan, Zou. (1999). "The Chinese traditional maritime boundary line in the South China Sea and its legal consequences for the resolution of the dispute over the Spratly Islands." *International Journal of Marine Coastal Law*, Vol. 14, Issue 1 dikutip dalam International Crisis Group. (2012, 23 April). "Stirring up the South China Sea (I)." *Crisis Group Asia Report* No. 223. Beijing/Brussel: ICG.
- (1999). "Scarborough Reef: A New Flashpoint in Sino-Philippine Relations?" *IBRU Boundary and Security Bulletin* (Summer).
- Kompas*. "Gagasan Poros Maritim Dunia." diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim> pada 16 Agustus 2015.
- KPU. (2014). "Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian." diakses melalui http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf pada 7 Agustus 2015.
- Kusumo, Rizky. (2014, 11 Februari). *Resensi Novel: Arus Balik (Pramoedya Ananta Toer)*.
- Kusumoprojo, Wahyono Suroto. (2009). "Indonesia Negara Maritim." Jakarta: PT. Muzan Publika.
- K., Karya WahyonoS. (2009). *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Penerbit Teraju.
- Lakitan, Benyamin. (2012). *Pengelolaan Sumberdaya Kelautan berbasis Iptek untuk Kemakmuran Bangsa*. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi.
- Lo, Chi Kin. (2003). *China's Policy towards territorial disputes: the case of the South China Sea Islands*. London: Routledge.
- Lohman, W. (2014). *A Critical Assessment of ASEAN's Diplomacy Regarding the South China Sea*. Territorial Disputes in the South China Sea: Navigating Rough Waters.
- Luhulima, C. P. F. (2011). *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahan, Alfred T. (2011). *Mahan on Naval Warfare: Selections from the Writings of Rear Admiral Alfred T. Mahan*. New York: Courier Dover Publications.
- (2014). *Discussion of the Elements of Sea Power and Geopolitics: An Introductory Reader*. New York: Cambridge.
- Malik, Mohan. (2013). "Historical Fiction: China's South China Sea Claims." <http://www.worldaffairsjournal.org/article/historical-fiction-china%E2%80%99s-south-china-sea-claims> diakses pada 25 Agustus 2015.

- Mangindaan, Robert. (2010). *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif NKRI*. Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: Centre of Defense and Maritime Studies.
- Mangindaan, Laksda TNI (Purn) Robert. (2015). Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM), Wawancara, 6 Agustus 2015.
- Manurung, H. (2014). *Indonesia's Maritime Pivot and Joko Widodo (Jokowi) Transformational Leadership*. Available at SSRN 2510986.
- Marsudi, Retno L. P. (2015, 20 Mei). "Diplomasi Poros Maritim Indonesia." *Harian Kompas*.
- Metro TV News. (2014, 3 Juli). "Poros Maritim, Cara Jokowi Jadikan Indonesia Disegani Dunia." (<http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/03/260738/poros-maritim-cara-jokowi-jadikan-indonesia-disegani-dunia>) diakses pada 28 April 2015.
- Middleton, Rachel. (2015, 5 Agustus). "China and ASEAN clash over diplomatic approach to South China Sea territorial dispute." (<http://www.ibtimes.co.uk/china-asean-clash-over-diplomatic-approach-south-china-sea-territorial-dispute-1514109>) diakses pada 21 Agustus 2015.
- Morgenthau, Hans J. (2010). *Politik Antar Bangsa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 169.
- Muhammad, Simela Victor. (2014). "Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia." *Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional* Vol. VI (November).
- Mukherjee, Shayani. (2015, 5 Agustus). "China not playing by ASEAN rules as South China Sea tensions rise." (<http://www.ibtimes.com.au/china-not-playing-asean-rules-south-china-sea-tensions-rise-1459101>) diakses pada 26 Agustus 2015.
- M., Bottema M. J. dan Bush, Sr. (2012). "The Durability of Private Sector-led Marine Conservation: A case study of two entrepreneurial marine protected areas in Indonesia." *Ocean and Coastal Management*.
- Ng, Jason dan Trefor Moss. (2015, 8 Juni). "Malaysia Toughens Stance With Beijing Over South China Sea." (<http://www.wsj.com/articles/malaysia-toughens-stance-with-beijing-over-south-china-sea-1433764608>) diakses pada 26 Agustus 2015.
- Panda, Ankit. (2015, 1 Agustus). "For The ASEAN-China South China Sea Code of Conduct, Ninth Time Isn't the Charm." (<http://thediplomat.com/2015/08/for-the-asean-china-south-china-sea-code-of-conduct-ninth-time-isnt-the-charm/>) diakses kembali pada 23 Agustus 2015.

- Panel Forum Lokakarya. (2003, 11 Desember). "Strategi Pembangunan Maritim Kawasan Selatan Indonesia." Yogyakarta.
- Parameswaran, Prashanth. (2015, 11 Februari). "China Unveils Major South China Sea Gas Find," <http://thediplomat.com/2015/02/china-unveils-major-south-china-sea-gas-find/> diakses pada 25 Agustus 2015.
- Pattiradjawane, Rene L. (2015). *South China Sea Disputes: Sovereignty and Indonesian Foreign Policy*. Singapura: RSIS.
- Pedrozo, Raul. (2011). "Beijing's coastal real estate: a history of Chinese naval aggression." *Foreign Policy* (15 November) dalam catatan kaki pada International Crisis Group. (2012, 23 April). "Stirring up the South China Sea (I)." *Crisis Group Asia Report* No. 223. Beijing/Brussel: ICG.
- Peterson, John. "The Strategic Environment." diakses melalui <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/strat-ldr-dm/pt1ch2.html> pada tanggal 10 April 2015.
- Pham, Nga. (2014, 15 Januari). "Shift as Viet Nam marks South China Sea battle," <http://www.bbc.com/news/world-asia-25709833> diakses pada 25 Agustus 2015.
- Poling, Gregory B. (2014, 3 April). "The Philippines' South China Sea Memorial: Sailing into the Wind." <http://csis.org/publication/philippines-south-china-sea-memorial-sailing-wind> diakses pada 25 Agustus 2015.
- Prasetyono, Edy, Andi Widjajanto, Makmur Keliat. (2012). *Dinamika Pensejajaran dan Revitalisasi Industri Pertahanan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Prasetyono, Edy. (2015). "Menjadi Poros Maritim Dunia, Indonesia Harus Menjadi Referensi Dunia Maritim, Budaya dan Ilmu Pengetahuannya." Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.
- P., Adam Liff, G. John Ikenberry. (2014). "Racing toward Tragedy?: China's Rise, Military Competition in the Asia Pacific, and the Security Dilemma", *International Security*, 39(2).
- Rahman, Zulkifli. (2012, 29 September). *Sejarah Kemaritiman Indonesia*.
- Rajagopalan, Rajeswari Pillai. (2008). *Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*.
- Republik Rakyat Tiongkok. (2011). China's Defence White Paper 2010. diakses dari http://eng.chinamil.com.cn/special-reports/node_47506.htm pada tanggal 10 Agustus 2015.
- Rowan, J.P. (2005). "ASEAN, and the South China Sea Dispute" *Asian Survey* 45(3).

- Salim. (2012). *Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*.
- Salmon, Trevor C., et. al. (2008). *Issues in International*, 2nd Edition. Oxon: Routledge.
- Santolan, Joseph. (2011, 31 Mei). "Chinese patrol boats confront Viet Nameese oil exploration ship in South China Sea." <https://www.wsws.org/en/articles/2011/05/chin-m31.html> diakses pada 25 Agustus 2015.
- Siahaan, N.H.T. (1989). *Hukum Laut Nasional. Himpunan Perundang-undangan Kemaritiman*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Simatupang, Goldy Evi Grace. (2013). *Modernisasi Militer Asia Tenggara: Destabilisasi Keamanan Regional?* diakses dari <http://www.fkpmaritim.org/modernisasi-militer-asia-tenggara-destabilisasi-keamanan-regional/> pada 10 Agustus 2015.
- SIPRI. Military Expenditure Data 2014. diakses dari <http://milexdata.sipri.org/> pada 10 Agustus 2015.
- Son, Anh. (2014, 24 Desember). "Viet Nameese ambassador says Russia to remain top arms seller." http://www.thanhniennews.com/politics/Viet_Nameese-ambassador-says-russia-to-remain-top-arms-seller-36672.html diakses pada 22 Agustus 2015.
- Song, Y. H. (2011). "The Declaration on the Conduct of Parties and a Code of Conduct in the South China Sea: Recent Actions Taken by ASEAN." *Asia-Pacific Studies Forum* No. 52.
- Storey, Ian. (2008). "Conflict in the South China Sea: China's Relations with Viet Nam and the Philippines." <http://www.japanfocus.org/-ian-storey/2734/article.html> diakses pada 25 Agustus 2015.
- Suharna, Karmin. (2012). "Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan dampaknya bagi ketahanan Nasional." http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments/1960_tannas%20karmin%20-20konflik%20dan%20solusi%20laut%20china%20selatan.pdf diakses pada 24 Agustus 2015.
- Sukma, R. (2010). "Indonesia's Security Outlook, Defence Policy, and Regional Cooperation." *National Institute for Defense Studies, Japan, Joint Research Series 5*.
- Sukma, R. (2013). *Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in Southeast Asia*.
- Sumakul, Willy F. (2014). "Poros Maritim dan ISPS Code di Indonesia." *Quarterdeck*, Vol. 8 (2).

- Supriyanto, Ristian Atriandi. (2015). *Indonesia's Natuna Islands: Next Flashpoint in the South China Sea*. Singapura: RSIS.
- Surya, T. Ade. (2014). *Optimalisasi Pembangunan Kemaritiman Nasional*. Jakarta: P3DI.
- Syawfi, Idil. (2009). *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*. Jakarta: Universitas Indonesia dikutip dalam Arifin Multazam. (2010). *Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*. Tesis Universitas Indonesia.
- Tabloid Diplomasi*. "Media Komunikasi dan Interaksi." Nomor 84 Tahun VIII.
- Tan, Andrew. (2004). *Force Modernisation Trends in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Defense and Strategic Studies.
- Thayer, Carlyle A. (2010). *The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea*, Vol. 6.
- Thayer, Carl. (2015, 23 Januari). "The Philippines, Malaysia, and Viet Nam Race to South China Sea Defense Modernization." [http://thediplomat.com/2015/01/the-philippines-malaysia-and-Viet Nam-race-to-south-china-sea-defense-modernization/](http://thediplomat.com/2015/01/the-philippines-malaysia-and-Viet-Nam-race-to-south-china-sea-defense-modernization/) diakses pada 22 Agustus 2015.
- Tønnesson, Stein. (2003). "Sino-Viet Nameuse rapprochement and the South China Sea irritant." *Security Dialogue* Vol. 34, No. 1 (Maret) dalam catatan kaki pada International Crisis Group. (2012, 23 April). "Stirring up the South China Sea (I)." *Crisis Group Asia Report* No. 223. Beijing/Brussel: ICG.
- Tri, Ngo Minh dan Koh Swee Lean Collin. (2014, 23 Januari). "Lessons from the Battle of the Paracel Islands." <http://thediplomat.com/2014/01/lessons-from-the-battle-of-the-paracel-islands/> diakses pada 25 Agustus 2015.
- United Kingdom. "Defence Diplomacy." *Ministry of Defence Policy Paper* No. 1.
- U.S. Department of Defense. (2012). *Report to Congress on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2012*. Washington D.C.: Office of the Secretary of Defense diakses melalui http://www.defense.gov/pubs/pdfs/2012_CMPR_Final.pdf pada 10 Agustus 2015.
- U.S. Energy Information Administration. (2008). dikutip dalam Harnit Kaur Kang. (2012). "South China Sea: Everlasting Antagonism." *IPCS Special Report* 133..
- U.S. Energy Information Administration. (2013, 3 April). "Contested areas of South China Sea likely have few conventional oil and gas resources." <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10651> diakses pada 25 Agustus 2015.

- Wall Street Journal. (2010, 28 Juli). "Battle of the South China Sea." <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703977004575392631691738648> diakses pada 25 Agustus 2015.
- Weatherbee, D. (2013). *Indonesia in ASEAN: vision and reality* (Vol. 1), Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Yasuhiro, Matsuda. (2006). *An Essay on China's Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*.
- Yusuf, Chandra Motik (ed.). (2008). *Maritime Dimensions Of A New World Order*. dalam Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta: IND Hill Co.